

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang 2014



Badan Perencanaan Daerah kota Bontang



Badan Pusat Statistik Kota Bontang

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA BONTANG

Welfare Indicators of Bontang City

2014

Nomor Publikasi / Publication Number : 64742.1401

Nomor Katalog / Catalogue Number : 4013.6474

Naskah / Manuscript :

Seksi Statistik Sosial

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Social Statistic

BPS – Statistics of Bontang City

Diterbitkan Oleh / Published by :

Badan Pusat Statistik Kota Bontang

BPS – Statistics of Bontang City

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

May be cited with reference to the source

KATA PENGANTAR

Puji syukur Kami haturkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Semesta Alam, yang telah memberikan jalan dan kemudahan bagi Kami dalam menyelesaikan publikasi "**Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2014**" ini. Publikasi ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Bontang dan bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai perkembangan tingkat kesejahteraan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat Kota Bontang dari waktu ke waktu.

Data yang disajikan dalam publikasi ini sebagian besar diperoleh dari hasil pendataan Survei Sosial Ekonomi (SUSENAS) Kota Bontang tahun 2013, dan dilengkapi dengan data pendukung dari berbagai sumber terkait. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, data terbaru dalam publikasi ini bukan lagi data tahun berjalan, namun data lengkap satu tahun (*time lag data* satu tahun). Selain itu, terkait dengan peluncuran angka proyeksi penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 oleh BPS dan Bappenas pada awal tahun 2014, telah dilakukan penyesuaian (*backcasting*) data hasil survei tahun 2011—2012, sehingga data tahun 2011 dan 2012 juga mengalami penyesuaian (revisi) apabila dibandingkan dengan data yang ditampilkan pada publikasi tahun-tahun sebelumnya.

Kami menyadari masih banyak indikator kesejahteraan rakyat yang belum disajikan di dalam publikasi ini. Namun kami berharap kehadiran publikasi ini dapat berperan positif dalam pengambilan kebijakan pembangunan di Kota Bontang. Akhir kata, Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan publikasi ini.

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kota Bontang

Ir. Zulkifli, MT.
NIP. 19620731 199301 1 001

Bontang, November 2014
Kepala Badan Pusat Statistik
Kota Bontang,

Drs.H.Basiran Suwandi
NIP. 19601005 198203 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Sistematika Penulisan	3
1.3. Sumber Data.....	4
BAB II. KONSEP DAN DEFINISI	5
2.1. Kependudukan	5
2.2. Pendidikan.....	7
2.3. Kesehatan.....	9
2.4. Ketenagakerjaan	10
2.5. Perumahan	11
2.6. Pengeluaran Rumahtangga	12
BAB III. KEPENDUDUKAN	13
3.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk.....	14
3.2. Fertilitas dan Mortalitas.....	17
3.3. Struktur Umur Penduduk.....	22
3.4. Keluarga Berencana.....	25
BAB IV. PENDIDIKAN	30
4.1. Tingkat Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan.....	32
4.2. Tingkat Partisipasi Sekolah	35
4.3. Fasilitas Pendidikan	41
BAB V. KESEHATAN.....	45
5.1. Fasilitas Kesehatan	46

5.2.	Kesehatan Balita.....	47
5.3.	Angka Kesakitan.....	52
BAB VI. KETENAGAKERJAAN		58
6.1.	Keadaan Angkatan Kerja	59
6.2.	Lapangan Usaha Utama	61
6.3.	Status Pekerjaan	64
BAB VII. P E R U M A H A N		69
7.1.	Kondisi Perumahan.....	70
7.2.	Fasilitas Rumah.....	74
BAB VIII. POLA KONSUMSI.....		81
8.1.	Pengeluaran Rumah Tangga.....	81
8.2.	Komposisi Pengeluaran Rumahtangga	83

<http://bontangkota.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Luas Wilayah Daratan, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Tahun 2012—2013	14
Tabel 3.2. Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang, Tahun 2007—2013	17
Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan, Tahun 2013 ^{*)}	18
Tabel 3.4. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama, Tahun 2011—2013	20
Tabel 3.5. Beberapa Indikator Demografi Kota Bontang, Tahun 2011—2013	21
Tabel 3.6. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2013	22
Tabel 3.7. Persentase Penduduk Produktif, Penduduk Belum/Tidak Produktif, dan Rasio Kebergantungan, Tahun 2011—2013	25
Tabel 3.8. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tahun 2011—2013	26
Tabel 3.9. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2011—2013	27
Tabel 3.10. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, Tahun 2011—2013	29
Tabel 4.1. Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Kota Bontang, Tahun 2009—2012	33
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 10 ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2011—2013	34

Tabel 4.3.	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2011—2013	36
Tabel 4.4.	Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Bontang, Tahun 2013 ^{*)}	39
Tabel 4.5.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SD/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2012/2013.....	41
Tabel 4.6.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2012/2013.....	42
Tabel 4.7.	Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMU/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2012/2013.....	42
Tabel 5.1.	Rasio Sarana Kesehatan terhadap 10.000 Penduduk, Tahun 2008—2012	46
Tabel 5.2.	Persentase Penolong Proses Kelahiran Menurut Urutan Pertolongan, Tahun 2012—2013	48
Tabel 5.3.	Persentase Balita Menurut Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2011—2013	50
Tabel 5.4.	Persentase Balita Menurut Lama Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2012—2013	51
Tabel 5.5.	Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Keluhan Kesehatan, Tahun 2012—2013.....	52
Tabel 5.6.	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan Kesehatan, Tahun 2012—2013.....	53
Tabel 5.7.	Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Laman Gangguan, Tahun 2012—2013	55
Tabel 5.8.	Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012—2013	56
Tabel 5.9.	Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Obat yang Digunakan, Tahun 2012—2013	57
Tabel 6.1.	Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama, Tahun 2011—2013	60

Tabel 6.2.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2013 ^{*)}	62
Tabel 6.3.	Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2012—2013.....	66
Tabel 7.1.	Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, Tahun 2011—2013.....	70
Tabel 7.2.	Kondisi Perumahan di Kota Bontang, Tahun 2011—2013.....	72
Tabel 7.3.	Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, Tahun 2011—2013.....	74
Tabel 7.4.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, Tahun 2011—2013.....	75
Tabel 7.5.	Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, Tahun 2011—2013	76
Tabel 7.6.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kota Bontang, Tahun 2011—2013.....	78
Tabel 7.7.	Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2011—2013.....	79
Tabel 7.8.	Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, Tahun 2011—2013	80
Tabel 8.1.	Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2008—2013.....	82
Tabel 8.2.	Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rata-rata Perbulan, Tahun 2011—2013.....	84

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 3.1. Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang Tahun 2007—2013 (% pertahun).....	16
Grafik 3.2. Piramida Penduduk Kota Bontang, Tahun 2013.....	24
Grafik 3.3. Rasio Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2013	28
Grafik 4.1. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Partisipasi Sekolah, Tahun 2011—2013	37
Grafik 5.1. Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran, Tahun 2013	48
Grafik 6.1. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2013	65
Grafik 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah, Tahun 2013	68
Grafik 8.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Perbulan, Tahun 2013.....	80

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Proses pembangunan di Indonesia telah berjalan lebih dari enam dasa warsa sejak diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proses tersebut merupakan suatu rangkaian panjang berbagai program yang disusun dan direncanakan untuk mencapai target-target pembangunan yang diinginkan. Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia menjalin kerja sama dengan negara-negara lain di berbagai bidang pembangunan. Pada Bulan September tahun 2000, Indonesia bersama-sama dengan sekitar 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan sebuah komitmen untuk mengintegrasikan suatu paradigma pembangunan global sebagai bagian dari program pembangunan nasional. Hal tersebut sebagai upaya menangani penyelesaian berbagai persoalan terkait isu-isu yang sangat mendasar tentang pemenuhan hak asasi dan kebebasan. Paradigma pembangunan tersebut dikenal dengan nama Millenium Development Goals (MDGs) atau Tujuan Pembangunan Milenium. Terdapat delapan tujuan yang ditetapkan di dalam MDGs, dan masing-masing tujuan memiliki target yang pencapaiannya diukur dengan berbagai indikator. Sebagai wujud komitmennya, maka pemerintah Indonesia dengan didukung oleh pemerintah daerah berupaya menyusun berbagai indikator sosial dan ekonomi, di antaranya Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) untuk mengevaluasi pencapaian masing-masing tujuan.

Pemerintah Kota Bontang pun telah meletakkan landasan yang kuat agar tahap-tahap pembangunan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan itu dapat tercapai. Dengan visi mewujudkan masyarakat

berbudi luhur, maju, adil, dan sejahtera, Pemerintah Kota Bontang menyusun berbagai bentuk program dan dituangkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kandungan RPJMD 2011—2016 yang digunakan saat ini merupakan perbaikan dari RPJMD sebelumnya sehingga lebih sesuai dengan program prioritas dan program strategi pada misi Pemerintah Kota Bontang, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seperti listrik dan air bersih.

Untuk mendukung keberjalanan proses pembangunan tersebut, ketersediaan berbagai informasi sangat dibutuhkan. Peranan penting informasi di dalam pembangunan bukan hanya sebagai bahan evaluasi pencapaian pembangunan, namun juga sebagai bahan pertimbangan dan acuan dalam merumuskan berbagai kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Informasi tersebut dapat berupa informasi kualitatif maupun kuantitatif yang disajikan dalam bentuk bermacam-macam indikator.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2013 hadir sebagai bagian dari penyediaan informasi, terutama mengenai keadaan sosial dan ekonomi masyarakat Kota Bontang. Data yang disajikan di dalam publikasi ini diharapkan mampu memberikan gambaran umum mengenai kondisi sosial-ekonomi masyarakat Kota Bontang, sehingga memberikan manfaat bagi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat luas dalam menjalankan perannya masing-masing di dalam proses pembangunan Kota Bontang khususnya, dan Indonesia umumnya.

Data di dalam publikasi ini dihasilkan dari kegiatan statistik yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dengan metodologi yang dirancang sedemikian rupa sehingga kehadiran kendala-kendala di dalam metodologi dapat diterima secara umum. Perkembangan sosial antar waktu di dalam publikasi ini merupakan kondisi makro. Oleh sebab itu data tersebut perlu

disandingkan dengan berbagai data lain yang sifatnya mikro sehingga diperoleh gambaran kondisi kesejahteraan rakyat Kota Bontang yang holistik (menyeluruh).

1.2. Sistematika Penulisan

Delapan bagian besar Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang Tahun 2013 ini dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang, sistematika penulisan dan sumber data;
- Bab II. Konsep dan Definisi, membahas tentang konsep-konsep dan definisi-definisi dari pembahasan ;
- Bab III. Kependudukan, memuat data dan ulasan tentang penduduk dan karakteristiknya, keluarga berencana dan berbagai aspek lain yang berkaitan dengan kependudukan ;
- Bab IV. Pendidikan, memuat data dan ulasan yang berkaitan dengan pendidikan, seperti tingkat partisipasi sekolah, persentase melek huruf, dan sebagainya ;
- Bab V. Kesehatan, memuat data dan ulasan tentang gambaran derajat kesehatan masyarakat beserta ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan ;
- Bab VI. Ketenagakerjaan, memuat data dan ulasan tentang kondisi angkatan kerja, lapangan usaha dan jenis pekerjaan ;
- Bab VII. Perumahan, memuat data dan ulasan tentang kondisi perumahan dan keadaan lingkungan perumahan dan terakhir;

Bab VIII. Pola Konsumsi, yang memuat data dan ulasan mengenai pengeluaran dan konsumsi rumah tangga;

Setiap pembahasan dilengkapi dengan pengertian konsep dan definisi sebagai landasan teori yang digunakan pada bab tersebut. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembaca mengkaji dan menelaah isi pembahasan pada setiap bab.

1.3. Sumber Data

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Bontang tahun 2013 disusun berdasarkan data primer hasil survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik dan data sekunder dari dinas/instansi terkait. Sebagian besar data merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2011—2013 yang dilakukan setiap triwulan, dan dilengkapi dengan data penduduk yang diperoleh dari proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010. Selain itu, beberapa data sekunder yang bersumber dari dinas/instansi terkait juga digunakan sebagai pelengkap dan pembanding. Pendataan SUSENAS dilakukan setiap tiga bulan sekali (triwulanan). Gabungan data empat triwulan akan menghasilkan data satu tahun secara lengkap. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, data terbaru yang disajikan di dalam publikasi ini adalah data dengan *time lag* satu tahun (tahun 2013), maka data yang digunakan adalah data yang sudah lengkap satu tahun. Selain itu, data tahun 2011—2012 juga mengalami revisi (penyesuaian) berkaitan dengan telah diluncurkannya angka proyeksi penduduk Indonesia oleh BPS dan Bappenas pada bulan Januari 2014 berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010. Sedangkan data tahun 2014 akan disajikan pada publikasi berikutnya, yaitu setelah diperoleh data lengkap satu tahun.

BAB II. KONSEP DAN DEFINISI

Konsep dan definisi merupakan suatu hal mendasar yang dapat menyebabkan perbedaan penilaian terhadap suatu fenomena. Dalam melakukan kegiatan sensus dan survei, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan suatu konsep dan definisi yang digunakan secara seragam di seluruh Indonesia dan mengacu pada konsep-konsep yang digunakan secara luas di dunia Internasional. Hal tersebut dimaksudkan agar kesetaraan perbandingan (*apple to apple comparison*) antar wilayah di dalam negeri maupun antar negara dapat dilakukan. Beberapa konsep dan definisi yang digunakan di dalam publikasi ini adalah sebagai berikut.

2.1. Kependudukan

Penduduk adalah setiap orang, baik warga negara Republik Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang telah berdomisili di dalam wilayah Republik Indonesia (region wilayah provinsi/kab/kota) selama enam bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Sebaliknya, setiap orang yang telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia (region wilayah provinsi/kab/kota) selama enam bulan atau lebih, dan mereka yang telah pergi kurang dari enam bulan namun bertujuan untuk pindah, dianggap sebagai bukan penduduk.

Jumlah penduduk merupakan perpaduan antara kekuatan yang menambah dan yang mengurangi banyaknya penduduk. Kekuatan yang menambah banyaknya penduduk adalah kelahiran dan migrasi masuk (penduduk datang), sedangkan kekuatan yang mengurangi banyaknya penduduk adalah kematian dan migrasi keluar (penduduk pindah).

Migrasi didefinisikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain baik melewati batas politis negara, batas administrasi, maupun batas bagian dalam suatu negara/region/wilayah provinsi/kab/kota dengan tujuan menetap. Sesuai dengan definisi penduduk di atas, maka seseorang dianggap migran jika telah tinggal selama enam bulan berturut-turut atau kurang dari enam bulan tetapi dengan tujuan akan menetap

Perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun dapat diukur dengan indikator laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang hanya dipengaruhi oleh faktor kelahiran dan faktor kematian disebut dengan laju pertumbuhan alamiah, sedangkan laju pertumbuhan yang hanya dipengaruhi oleh migrasi disebut dengan laju pertumbuhan sosial.

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan yaitu (1) penduduk usia belum produktif yaitu penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun, (2) penduduk usia produktif yaitu penduduk yang berusia 15–64 tahun, dan (3) penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk yang berusia 65 tahun atau lebih.

Sedangkan berdasarkan tipikal wilayah tempat tinggalnya, penduduk dapat pula dikategorikan sebagai penduduk perkotaan dan penduduk perdesaan. Bertambahnya proporsi penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingkan dengan di wilayah perdesaan disebut dengan urbanisasi atau lebih sering diartikan sebagai arus perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Selanjutnya kelahiran adalah anak lahir hidup, yaitu anak yang pada waktu dilahirkan menunjukkan tanda-tanda kehidupan (seperti jantung berdenyut, bernapas, menangis, dan sebagainya), walaupun mungkin hanya beberapa saat saja. Sedangkan anak masih hidup adalah semua

anak yang dilahirkan dan pada saat pencacahan/pendataan masih hidup, baik yang tinggal bersama ibunya maupun tinggal di tempat lain. Kematian adalah suatu peristiwa atau keadaan hilangnya tanda-tanda kehidupan dari seseorang.

Khusus untuk penduduk berjenis kelamin wanita, terdapat dua kelompok besar berdasarkan usia, yaitu wanita usia subur dan wanita bukan usia subur. Wanita usia subur adalah wanita yang berada pada masa mampu melahirkan atau masa reproduksi (usia 15—49 tahun), sedangkan di luar rentang usia itu dianggap sebagai wanita bukan usia subur.

Hal yang berkaitan erat dengan wanita usia subur adalah penggunaan alat/cara Keluarga Berencana (KB). Pasangan usia subur yang menggunakan salah satu alat kontrasepsi/cara KB disebut dengan akseptor. Seseorang dianggap sebagai peserta KB aktif apabila pada saat pencacahan/pendataan masih aktif mengikuti program KB (memakai alat kontrasepsi/cara KB). Yang dimaksud dengan metode kontrasepsi adalah suatu cara/alat yang dipakai untuk mencegah kehamilan.

2.2. Pendidikan

Hal pertama yang terkait dengan pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis. Seseorang dikatakan dapat membaca dan menulis apabila memiliki kemampuan membaca dan menulis surat/kalimat sederhana dengan suatu jenis huruf (misalnya Huruf Latin, Huruf Arab, Huruf Sanskerta, dan sebagainya). Dalam hal ini, orang buta yang dapat membaca dan menulis Huruf Braille, dan orang cacat yang sebelumnya dapat membaca dan menulis kemudian karena cacatnya tidak dapat membaca dan menulis, digolongkan sebagai dapat membaca dan menulis. Sedangkan orang yang hanya dapat membaca saja tetapi tidak dapat menulis, dianggap tidak dapat membaca dan menulis (buta huruf).

Berdasarkan hal tersebut, maka penduduk yang dapat membaca dan menulis baik Huruf Latin, Arab, maupun huruf lainnya digolongkan sebagai penduduk melek huruf. Kemampuan menulis dan membaca ini biasanya dihitung untuk penduduk usia 10 tahun ke atas.

Hal berikutnya yang terkait dengan pendidikan adalah jenjang pendidikan atau sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah formal yang berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan Nasional, mulai dari pendidikan Dasar (SD dan SLTP), pendidikan Menengah (SMK atau SMU), pendidikan Tinggi (Akademi dan Universitas), dan pendidikan yang setara (paket A, paket B, dan paket C), tidak termasuk pendidikan non formal seperti kursus mengetik, komputer, bahasa Inggris, Seskoad, Diklatpim dan sebagainya.

Berdasarkan keikutsertaan seseorang pada suatu jenjang pendidikan, terdapat empat definisi penting yaitu (1) tamat sekolah, (2) tidak/belum pernah bersekolah, (3) masih bersekolah, dan (4) tidak bersekolah lagi. Seseorang dikatakan tamat sekolah apabila telah menyelesaikan pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan, baik di sekolah negeri maupun sekolah swasta, dengan mendapatkan tanda tamat/ijazah. Seseorang yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi jika mengikuti ujian akhir dan lulus dianggap tamat sekolah.

Selanjutnya, apabila seseorang tidak/belum pernah bersekolah, termasuk yang tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak dan tidak/belum melanjutkan ke Sekolah Dasar, maka dikategorikan sebagai tidak/belum pernah bersekolah. Namun, apabila seseorang sedang mengikuti pendidikan di salah satu jenjang pendidikan (SD, SLTP, SLTA, atau perguruan tinggi), maka dikategorikan sebagai masih bersekolah. Sedangkan seseorang pernah mengikuti jenjang pendidikan baik SD,

SLTP, SLTA, maupun perguruan tinggi, dan pada saat pencacahan sudah tidak aktif lagi, maka dikategorikan sebagai tidak bersekolah lagi.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki, adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang baik sudah tamat maupun tidak/belum tamat. Penduduk putus sekolah adalah mereka yang tidak dapat menamatkan suatu jenjang pendidikan.

Masing-masing jenjang pendidikan disetarakan dengan kelompok usia penduduk. Jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) disesuaikan dengan penduduk berusia 7—12 tahun, SLTP dengan penduduk berusia 13—15 tahun, SLTA dengan penduduk berusia 16—18 tahun, dan perguruan tinggi dengan penduduk berusia 19—24 tahun. Oleh sebab itu, usia 7—24 tahun dianggap sebagai usia sekolah. Sedangkan pendidikan prasekolah diselenggarakan selama satu sampai dua tahun bagi anak usia 5—6 tahun, yang merupakan persiapan sebelum memasuki Sekolah Dasar.

2.3. Kesehatan

Keluhan kesehatan adalah keadaan seseorang yang merasa terganggu oleh kondisi kesehatan atau kejiwaan, baik karena penyakit akut, penyakit kronis (meskipun selama sebulan terakhir tidak mempunyai keluhan), kecelakaan, kriminal, atau hal lain.

Sakit adalah apabila seseorang menderita penyakit kronis atau mempunyai keluhan/gangguan kesehatan lain yang menyebabkan kegiatan sehari-hari terganggu. Sedangkan cara pengobatan adalah perlakuan/cara yang ditempuh oleh seseorang apabila menderita suatu penyakit, seperti pergi ke dokter praktek, rumah sakit, puskesmas dan tenaga kesehatan lainnya, atau berusaha mengobati sendiri.

2.4. Ketenagakerjaan

Dalam konsep ketenagakerjaan, penduduk dibagi menjadi dua golongan yaitu penduduk usia kerja dan penduduk bukan usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 15 tahun ke atas, dan penduduk bukan usia kerja adalah penduduk berusia kurang dari 15 tahun. Penduduk usia kerja pun dibagi menjadi dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja atau yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, dan penduduk yang menganggur. Sedangkan bukan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang pada periode rujukan tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi karena bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya (olahraga, kursus, piknik, dan kegiatan sosial (berorganisasi, kerja bakti). Pengukuran bekerja atau tidak ini dilakukan berdasarkan periode rujukan (*time reference*) yaitu kegiatan yang dilakukan selama seminggu yang lalu yang dihitung mundur mulai sehari sebelum hari pencacahan.

Seseorang dikatakan bekerja apabila melakukan suatu pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan selama paling sedikit satu jam dalam seminggu. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan secara berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan dan keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan, bonus, dan hasil usaha berupa sewa, bunga, dan keuntungan yang berupa uang maupun barang. Termasuk bekerja adalah seseorang yang punya pekerjaan tetapi selama seminggu yang lalu sementara tidak bekerja karena sakit, cuti, mogok, menunggu panen dan lain-lain.

Seseorang dikatakan menganggur apabila tidak bekerja, tidak juga sementara tidak bekerja, dan atau mencari pekerjaan/mempersiapkan

usaha baru. Mencari pekerjaan adalah upaya yang dilakukan untuk memperoleh pekerjaan, termasuk kegiatan menunggu jawaban lamaran. Sedangkan mempersiapkan usaha baru adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha yang baru yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan buruh/karyawan. Termasuk juga orang yang sudah diterima bekerja tetapi selama seminggu yang lalu belum mulai bekerja.

Hari kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam hari yang dipergunakan oleh seseorang untuk melakukan kegiatan bekerja paling sedikit selama satu jam terus menerus. Jam kerja adalah waktu yang dinyatakan dalam jam yang dipergunakan untuk bekerja. Jam kerja normal adalah 35—44 jam perminggu.

2.5. Perumahan

Bangunan tempat tinggal yang dikuasai oleh rumah tangga merupakan suatu bangunan fisik yang memiliki lantai, dinding, dan atap. Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas suatu ruangan, baik yang terbuat dari marmer/keramik/granit, tegel/teraso, semen, kayu, tanah, atau lainnya. Luas lantai yang menjadi objek di dalam survei adalah luas lantai yang ditempati dan digunakan untuk keperluan sehari-hari (sebatas atap).

Sementara itu, atap rumah adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga anggota rumah tangga yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut. Sedangkan dinding rumah adalah sisi luar/batas suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lain.

Beberapa indikator lain yang terkait dengan kondisi perumahan rumah tangga adalah status penguasaan bangunan tempat tinggal, sumber penerangan utama yang digunakan, sumber air minum utama, dan penggunaan fasilitas tempat buang air besar.

2.6. Pengeluaran Rumahtangga

Pengeluaran rumah tangga sebulan adalah semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah tangga selama sebulan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan dan bukan makanan yang mencakup semua barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga baik yang berasal dari pembelian, pemberian oleh pihak lain, maupun dari produksi sendiri. Konsumsi rumah tangga hanya terbatas pada barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tidak termasuk pengeluaran untuk usaha atau diberikan kepada pihak lain.

BAB III. KEPENDUDUKAN

Proses pembangunan suatu negara/wilayah ditujukan untuk mencapai kesejahteraan bagi penduduknya. Di dalam proses tersebut, penduduk berperan sebagai objek sekaligus sebagai subjek, sedangkan pemerintah berperan sebagai pihak yang mengarahkan (*steering*) dengan berbagai rancangan program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Jumlah penduduk dapat menjadi suatu modal utama di dalam keberhasilan proses pembangunan, namun dapat pula menjadi beban di dalam proses pembangunan itu. Oleh sebab itu, kebijakan pembangunan yang terkait dengan kependudukan hendaknya diarahkan bukan hanya untuk mengendalikan jumlah penduduk, namun juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri.

Berbicara mengenai kesejahteraan penduduk adalah berbicara mengenai manusia dengan segala kompleksitas di dalamnya, yang terdiri atas banyak komponen yang satu sama lain saling berkaitan dan mempengaruhi. Oleh sebab itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia berkaitan erat dengan banyak hal, seperti kondisi sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, keamanan, kualitas lingkungan hidup dan sebagainya. Dengan demikian, menjadi penting untuk memandang persoalan penduduk secara holistik (menyeluruh) dengan tidak mengotakotakan persoalan tersebut.

Berbagai indikator yang dihasilkan oleh kegiatan statistik menjadi suatu alat bantu di dalam mengevaluasi keberhasilan program-program pembangunan yang telah dilaksanakan, dan sebagai alat bantu di dalam merencanakan program-program selanjutnya. Beberapa indikator kependudukan yang akan dibahas di dalam bab ini dapat digunakan untuk mengenali karakteristik dan kondisi penduduk di Kota Bontang.

3.1. Profil Persebaran dan Pertumbuhan Penduduk

Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur, Kota Bontang memiliki wilayah yang paling kecil. Dan apabila dibandingkan dengan kota lainnya di wilayah Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kota Bontang juga yang paling sedikit. Sehingga kepadatan penduduk Kota Bontang masih rendah, meski laju pertumbuhan penduduknya relatif tinggi.

Jumlah penduduk Kota Bontang pada tahun 2012 diperkirakan sekitar 154.604 jiwa dan menjadi sekitar 163.651 jiwa pada tahun 2013, atau naik dengan laju pertumbuhan sekitar 5,85 persen per tahun. Secara administrasi, Kota Bontang terdiri atas 3 kecamatan dan 15 kelurahan. Luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatan penduduk pada masing-masing kecamatan ditampilkan pada Tabel 3.1. di bawah ini.

Tabel 3.1. Luas Wilayah Daratan, Jumlah Penduduk, dan Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan, Tahun 2012—2013

Kecamatan	Luas Wilayah Daratan (Km ²)	2012		2013	
		Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	104,4	60.669	581	63.759	611
Bontang Utara	26,2	68.044	2.597	72.836	2.780
Bontang Barat	17,2	25.891	1.505	27.056	1.573
Jumlah	147,8	154.604	1.046	163.651	1.107

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Penduduk Kota Bontang paling banyak berada di Kecamatan Bontang utara, yaitu sekitar 44,51 persen dari seluruh penduduk Kota Bontang

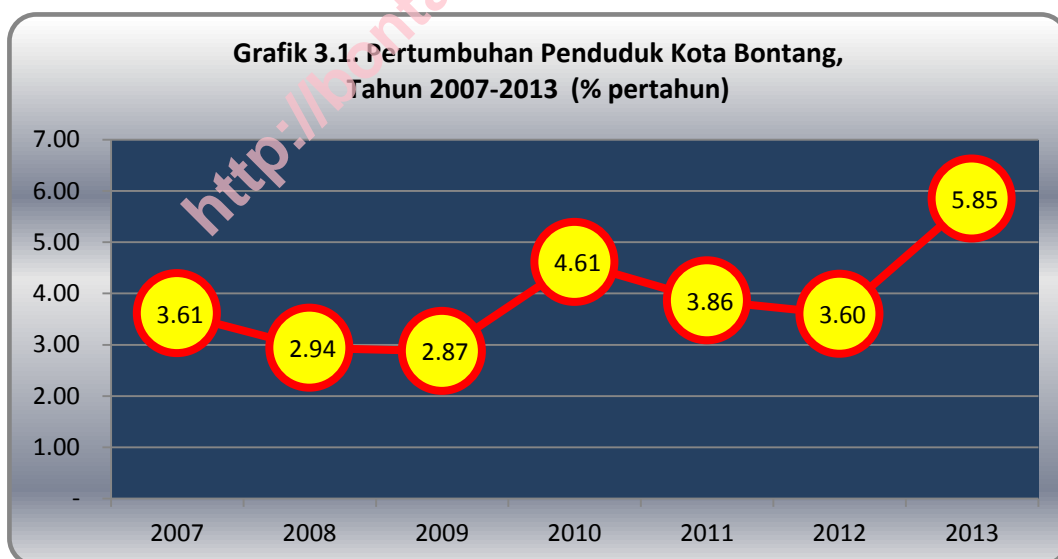
pada tahun 2013. Dengan luas wilayah yang hanya sekitar 17,73 persen dari seluruh wilayah Kota Bontang, hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Utara adalah yang paling tinggi apabila dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya.

Sementara itu Kecamatan Bontang Selatan yang memiliki luas wilayah hampir empat kali luas wilayah Kecamatan Bontang Utara dihuni oleh sekitar 38,96 persen penduduk Kota Bontang pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan rata-rata kepadatan penduduk di kecamatan ini pada tahun 2013 hanya sekitar 611 orang/km². Angka tersebut terpaut sangat jauh dengan kepadatan penduduk Kecamatan Bontang Utara pada tahun 2013 yang mencapai 2.780 orang/ km² atau hampir mencapai 5 kali kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan. Pemindahan pusat pemerintahan Kota Bontang dari Kecamatan Bontang Utara ke Kecamatan Bontang Selatan pada tahun 2011 diperkirakan akan dapat mengurangi konsentrasi penduduk dalam beberapa tahun ke depan.

Kecamatan Bontang Barat yang merupakan pemecahan dari dua kecamatan lainnya adalah kecamatan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk paling sedikit. Posisi kecamatan ini cukup strategis karena merupakan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Timur, di dalamnya berada terminal bis yang menghubungkan Kota Bontang dengan wilayah lainnya, dan dilalui oleh satu-satunya akses darat menuju pusat pemerintahan Kota Bontang yang berada di Kelurahan Bontang Lestari, Kecamatan Bontang Selatan. Kecamatan Bontang Barat memiliki luas wilayah sekitar 11,64 persen dari keseluruhan wilayah Kota Bontang, namun dihuni oleh sekitar 16,53 persen penduduk Kota Bontang pada tahun 2013. Hal tersebut menyebabkan kepadatan penduduk di kecamatan ini cukup tinggi, yaitu sekitar 1.573 jiwa/km², masih jauh lebih

tinggi apabila dibandingkan dengan kepadatan penduduk di Kecamatan Bontang Selatan.

Keberadaan dua industri besar yaitu PT. Badak NGL, dan PT. Pupuk Kalimantan Timur beserta industri dan jasa lainnya yang mendukung kedua industri tersebut menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi masyarakat dari wilayah lain untuk bermigrasi ke Kota Bontang. Selain itu, keberadaan lokasi pertambangan batubara di sekitar Kota Bontang juga mendorong penambahan jumlah penduduk Kota Bontang, karena karyawan perusahaan pertambangan tersebut sebagian besar memilih menetap di Kota Bontang. Hal tersebut terlihat pada laju pertumbuhan penduduk Kota Bontang yang cukup tinggi, mencapai 5,85 persen pada tahun 2013. Dinamika laju pertumbuhan penduduk Kota Bontang dalam beberapa tahun terakhir diperlihatkan oleh Grafik 3.1. berikut ini.



Apabila dilihat komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki di Kota Bontang lebih banyak dari pada jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan. Perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan diperlihatkan oleh Tabel 3.2. di bawah ini.

Tabel 3.2. Rasio Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bontang, Tahun 2007—2013

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin	Laju Pertumbuhan Per Tahun (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2007	66.847	62.853	129.700	106,35	3,61
2008	69.427	64.085	133.512	108,34	2,94
2009	71.648	65.701	137.349	109,05	2,87
2010	75.422	68.261	143.683	110,49	4,61
2011	78.166	71.064	149.230	109,99	3,86
2012	81.245	73.359	154.604	110,75	3,60
2013	85.597	78.054	163.651	109,66	5,85

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Pada Tabel 3.2. tersebut, terlihat bahwa dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir, untuk setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat sekitar 106—111 orang penduduk laki-laki. Hal ini sejalan dengan kondisi ketersediaan lapangan pekerjaan di sekitar Kota Bontang yang sebagian besar adalah untuk pekerja laki-laki, sehingga pendatang di Kota Bontang didominasi oleh laki-laki.

3.2. Fertilitas dan Mortalitas

Laju pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas mempengaruhi jumlah penduduk secara positif, dan mortalitas mempengaruhi secara negatif. Makin tinggi fertilitas suatu wilayah makin tinggi pula penambahan jumlah penduduk alamiahnya, begitu pula makin

tinggi tingkat mortalitas suatu wilayah makin tinggi pula pengurangan jumlah penduduk yang terjadi. Perpaduan keduanya menentukan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk per tahun.

Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama. Penghitungan indikator fertilitas biasanya dilakukan pada penduduk berusia 10 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa pada usia itu seseorang mulai berpeluang untuk bereproduksi. Konsep kawin dalam hal ini bukan hanya perkawinan yang sah secara hukum (adat, agama, negara, dan lainnya), namun juga mencakup kondisi hidup bersama antara laki-laki dan perempuan, dan dianggap sebagai suami-istri oleh masyarakat di sekelilingnya. Tabel 3.3. berikut ini memperlihatkan persentase penduduk Kota Bontang berdasarkan status perkawinan.

Tabel 3.3. Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke atas menurut Status Perkawinan, Tahun 2013

Status Perkawinan	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Belum Kawin	39,43	28,77	34,43
Kawin	59,02	65,85	62,23
Cerai Hidup	0,17	1,48	0,78
Cerai Mati	1,38	3,90	2,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Berdasarkan status perkawinannya, penduduk Kota Bontang yang berusia 10 tahun ke atas didominasi oleh penduduk yang berstatus kawin yaitu sekitar 62,23 persen. Pola tersebut berlaku baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, namun pada penduduk perempuan persentasenya

lebih tinggi yaitu sekitar 65,85 persen dan pada penduduk laki-laki adalah sekitar 59,02 persen.

Kelompok terbanyak kedua adalah penduduk usia 10 tahun ke atas yang berstatus belum kawin. Terdapat sekitar 34,43 persen penduduk Kota Bontang berusia 10 tahun ke atas yang belum kawin. Berkebalikan dengan penduduk berstatus kawin, persentase penduduk berstatus belum kawin lebih tinggi pada penduduk laki-laki apabila dibandingkan dengan persentase pada penduduk perempuan. Selibhnya, sekitar 3,34 persen penduduk Kota Bontang berusia 10 tahun ke atas berstatus cerai, baik cerai hidup (0,78 persen), maupun cerai mati (2,56 persen).

Indikator berikutnya yang dapat menggambarkan kondisi fertilitas suatu wilayah adalah umur penduduk perempuan pada saat perkawinan pertama. Makin muda seorang perempuan pada saat perkawinan pertama makin panjang pula masa reproduksinya, sehingga makin besar peluang untuk melahirkan anak. Hal tersebut tentu saja mempengaruhi tingkat fertilitas. Oleh sebab itu, penundaan usia perkawinan pertama akan memperpendek masa reproduksi dan menjadi salah satu cara dalam mengatur jumlah kelahiran anak atau tingkat fertilitas suatu wilayah.

Tabel 3.4. di bawah ini memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 sekitar 47,05 persen penduduk perempuan berusia 10 tahun ke atas dan berstatus pernah kawin, melakukan pernikahan pertama pada usia antara 19 sampai 24 tahun. Sedangkan yang melakukan perkawinan pertama pada usia di atas 25 tahun adalah sekitar 24,15 persen, atau cenderung lebih tinggi apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Penundaan usia perkawinan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan tingkat kesejahteraan seseorang secara ekonomi.

Tabel 3.4. Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun ke atas yang Pernah Kawin menurut Kelompok Usia Perkawinan Pertama, Tahun 2011—2013

Kelompok Usia Perkawinan Pertama	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
<=16	12,79	16,04	10,62
17—18	15,23	17,68	18,19
19—24	56,35	48,73	47,05
25+	15,63	17,55	24,15
Jumlah	100,00	100,00	100,00

r) = angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Meskipun merupakan wilayah perkotaan, memiliki akses yang cukup mudah ke wilayah kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur, dan arus informasi cukup lancar, ternyata jumlah penduduk perempuan yang menikah pada usia 16 tahun atau kurang masih cukup tinggi di Kota Bontang, yaitu diperkirakan sekitar 10,62 persen. Selain faktor pendidikan dan ekonomi, hal itu bisa jadi dipengaruhi pula oleh budaya dan adat istiadat yang diyakini.

Selanjutnya pada Tabel 3.5. di bawah ini diperlihatkan beberapa indikator kependudukan Kota Bontang pada tahun 2011—2013. Persentase penduduk perempuan usia subur yaitu yang berusia 15—49 tahun cukup tinggi, mencapai 58,05 persen dari seluruh penduduk perempuan di Kota Bontang pada tahun 2013. Tingginya jumlah wanita usia subur tentunya menambah tinggi pula peluang meningkatnya fertilitas atau kelahiran. Namun, apabila dilihat rata-rata jumlah anak lahir hidup di Kota Bontang, terlihat bahwa penduduk wanita yang pernah menikah rata-rata melahirkan 2—3 orang anak saja. Hal itu kemungkinan berkaitan dengan

kondisi perekonomian penduduk Kota Bontang yang cukup baik, karena sebuah teori menyatakan bahwa makin sejahtera seseorang secara ekonomi makin sedikit jumlah anak yang diinginkan. Sejalan dengan hal ini, rata-rata jumlah anak yang masih hidup pun cukup tinggi, hampir sama dengan rata-rata jumlah anak yang lahir hidup. Dengan demikian, jumlah kematian anak di Kota Bontang dapat dikatakan cukup rendah.

Tabel 3.5. Beberapa Indikator Demografi Kota Bontang, Tahun 2011—2013

Indikator	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Persentase wanita usia subur	59,65	57,65	58,05
Rata-rata anak lahir hidup (ALH)	2,45	2,63	2,40
Rata-rata anak masih hidup (AMH)	2,36	2,47	2,30
Rasio Anak-Wanita (CWR)	399	397	385
Angka Harapan Hidup (AHH)	72,60	72,78	73,12

r) = angka revisi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Fertilitas berkaitan pula dengan beban wanita usia subur di dalam mengasuh dan memelihara bayi atau balita. Indikator yang menunjukkan hal tersebut adalah rasio anak-wanita atau *child-women ratio* (CWR). Angka CWR Kota Bontang pada tahun 2013 adalah sebesar 385, yang berarti bahwa terdapat 385 balita yang harus dirawat dan dipelihara oleh setiap 1.000 orang wanita usia subur.

Beban wanita usia subur di dalam merawat dan memelihara bayi/balita tentu saja harus didukung oleh kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang baik. Hal itu bukan saja mempengaruhi tingkat kematian bayi, namun juga terkait dengan angka harapan hidup bayi yang dilahirkan.

Angka harapan hidup Kota Bontang cukup tinggi yaitu mencapai 72,78 tahun pada tahun 2012 dan menjadi 73,12 tahun pada tahun 2013. Hal tersebut mengandung makna bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2013 memiliki harapan hidup sampai usia 73,12 tahun. Angka ini lebih tinggi dari pada angka harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2013 yang mencapai 71,78 tahun.

3.3. Struktur Umur Penduduk

Komposisi penduduk suatu wilayah berkaitan erat dengan berbagai persoalan yang muncul seperti persoalan ekonomi dan sosial. Salah satu komposisi penduduk yang utama adalah komposisi menurut umur dan jenis kelamin. Tabel 3.6 berikut ini memperlihatkan komposisi penduduk Kota Bontang pada tahun 2013.

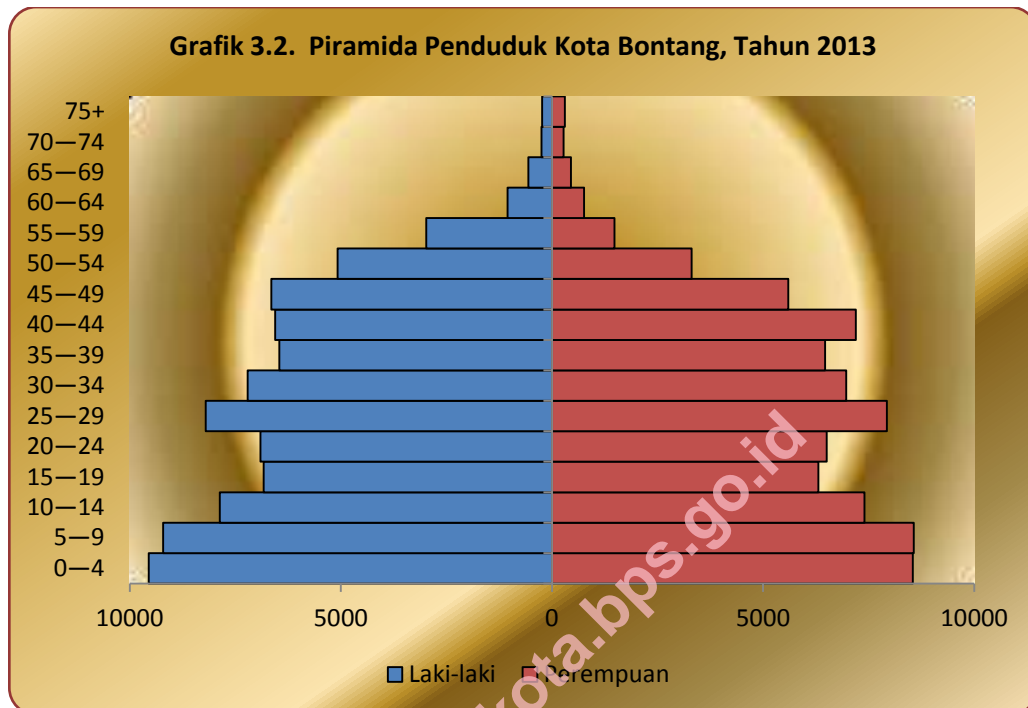
Tabel 3.6. Persentase Penduduk menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin, Tahun 2013

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
0—4	11,16	10,95	11,06
5—9	10,76	10,98	10,86
10—14	9,19	9,48	9,33
15—19	7,98	8,08	8,03
20—24	8,07	8,34	8,20
25—29	9,58	10,16	9,86
30—34	8,42	8,93	8,66
35—39	7,55	8,28	7,90

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
40—44	7,66	9,22	8,40
45—49	7,77	7,17	7,48
50—54	5,93	4,24	5,12
55—59	3,48	1,89	2,72
60—64	1,23	0,97	1,11
65—69	0,66	0,57	0,62
70—74	0,30	0,35	0,32
75+	0,27	0,39	0,33
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Terdapat tiga jenis struktur penduduk, yang pertama struktur penduduk muda yang dicirikan dengan sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda, tingkat kelahiran bayi tinggi, dan kelompok usia tua sedikit. Kedua, struktur penduduk stasioner yang menggambarkan keadaan penduduk yang tetap (statis) karena tingkat kematian rendah dan tingkat kelahiran tidak begitu tinggi, sehingga pertumbuhan penduduk sangat lambat. Ketiga, struktur penduduk tua yaitu apabila sebagian besar penduduk suatu negara/wilayah berusia tua yang menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat besar dan tingkat kematian yang sangat kecil. Struktur umur penduduk dapat terlihat secara lebih jelas jika ditampilkan dalam bentuk piramida penduduk. Grafik 3.2. di bawah ini menampilkan bentuk piramida penduduk Kota Bontang pada tahun 2013.



Berdasarkan bentuk piramidanya, struktur penduduk Kota Bontang dapat dikategorikan sebagai struktur penduduk muda, yang dicirikan oleh jumlah penduduk pada kelompok usia muda (15—64 tahun) yang sangat tinggi, yaitu sekitar 67,48 persen, sedangkan penduduk usia 0—14 tahun hanya sekitar 31,25 persen dari seluruh penduduk. Hal ini sejalan dengan tingginya pertumbuhan penduduk Kota Bontang, yang merupakan salah satu ciri struktur penduduk muda.

Seperti halnya laju pertumbuhan penduduk, struktur umur penduduk juga dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas dan migrasi. Peningkatan fertilitas mempengaruhi jumlah penduduk berusia 0—4 tahun, sementara mortalitas mempengaruhi jumlah penduduk pada masing-masing kelompok umur. Sedangkankan migrasi lebih banyak mempengaruhi kelompok usia dewasa (produktif) karena proses migrasi biasanya didorong oleh alasan ekonomi.

Manfaat lain dari struktur penduduk adalah dapat diketahui tentang rasio kebergantungan (*dependency ratio*), yaitu perbandingan jumlah penduduk berusia tidak produktif (0—14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif (15—64 tahun). Rasio ini dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara/wilayah, yaitu makin tinggi rasio makin tinggi pula beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Tabel 3.7 di bawah ini menunjukkan struktur penduduk Kota Bontang pada tahun 2013 terdiri atas 67,48 persen penduduk usia produktif dan 32,52 persen penduduk yang belum atau tidak produktif. Dengan demikian, rasio kebergantungan Kota Bontang pada tahun 2013 adalah sekitar 48,20 yang berarti bahwa terdapat sekitar 48—49 orang penduduk usia belum/tidak produktif yang ditanggung oleh 100 orang penduduk usia produktif.

Tabel 3.7. Persentase Penduduk Produktif, Penduduk Belum/Tidak Produktif, dan Rasio Kebergantungan, Tahun 2011—2013

Indikator	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Persentase penduduk usia produktif	65,34	66,85	67,48
Persentase penduduk belum/tidak produktif	34,66	33,15	32,52
Rasio kebergantungan	53,03	49,59	48,20

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

3.4. Keluarga Berencana

Salah satu bentuk upaya menahan laju pertumbuhan penduduk adalah dengan pengaturan jumlah dan jarak kelahiran anak melalui program Keluarga Berencana (KB). Hal ini sejalan dengan salah satu konsep

Beyond Family Planning yang menyatakan bahwa apabila program KB dikelola dengan baik, maka fertilitas akan dapat diturunkan.

Seperti telah disinggung pada bagian sebelumnya, jumlah penduduk perempuan dan jumlah penduduk usia subur merupakan indikator yang berkaitan erat dengan tingkat fertilitas. Oleh sebab itu, program KB ditujukan pada kelompok penduduk tersebut. Tabel 3.8. di bawah ini menunjukkan persentase wanita usia subur (15—49 tahun) di Kota Bontang pada tiga tahun terakhir.

Tabel 3.8. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Kelompok Umur, Tahun 2011—2013

Kelompok Umur	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
15—19	0,87	1,18	2,27
20—24	10,17	8,68	9,58
25—29	19,31	20,10	16,77
30—34	19,29	18,61	20,50
35—39	18,57	20,75	22,13
40—44	18,62	13,95	16,16
45—49	13,17	16,73	12,59
Jumlah	100,00	100,00	100,00

r) = angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Tabel 3.8. menunjukkan bahwa penduduk usia subur di Kota Bontang yang berjenis kelamin perempuan dan sudah pernah kawin paling banyak berusia antara 35—39 tahun. Pada Tahun 2013, penduduk perempuan usia subur yang berstatus pernah kawin dan berusia kurang dari 25 tahun

adalah sekitar 11,85 persen. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan makin tingginya kesadaran penduduk Kota Bontang tentang pentingnya pendidikan, sehingga perempuan berusia kurang dari 25 tahun lebih memilih melanjutkan sekolah dari pada menikah. Apabila hal ini dikaitkan dengan Tabel 3.4. pada subbab sebelumnya yang menunjukkan persentase penduduk menurut usia perkawinan pertama, maka dapat disimpulkan bahwa penduduk Kota Bontang yang menikah pada usia belia adalah mereka yang saat ini sudah berusia lanjut.

Sosialisasi program KB di Kota Bontang yang dilakukan oleh berbagai pihak sepertinya berjalan dengan cukup baik. Hal ini terlihat pada tingginya keikutsertaan pasangan usia subur pada program ini. Tabel 3.9. berikut memperlihatkan persentase penduduk perempuan yang menggunakan alat/cara KB.

Tabel 3.9. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin menurut Penggunaan Alat/Cara KB, Tahun 2011—2013

Penggunaan Alat/Cara KB	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Sedang menggunakan	47,59	54,56	51,38
Tidak menggunakan lagi	34,05	29,00	27,67
Tidak pernah menggunakan	18,36	16,44	20,95
Total	100,00	100,00	100,00

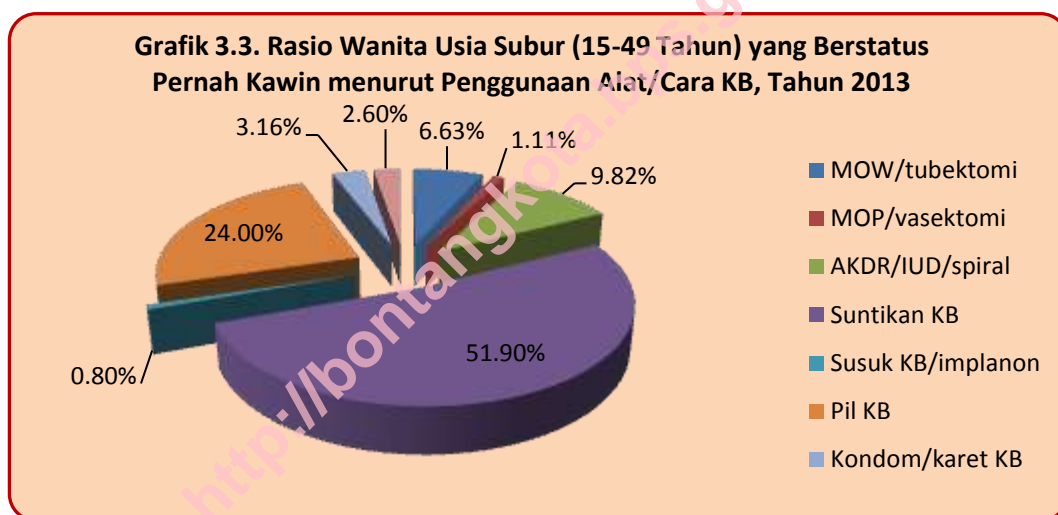
r) = angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Meskipun masih terdapat pro dan kontra terkait program KB seperti isu hak asasi manusia, isu agama, isu adat istiadat, bahkan isu kesehatan, namun dengan sosialisasi yang makin luas dan makin beragamnya sumber informasi yang diperoleh oleh masyarakat, program KB masih dapat

berlanjut. Hal ini terlihat pada Tabel 3.9. di atas yaitu lebih dari setengah penduduk perempuan berusia subur dan berstatus pernah kawin di Kota Bontang sedang menggunakan alat/cara KB.

Program KB ditujukan bagi pasangan usia subur dengan menyediakan berbagai pilihan alat/cara KB baik bagi laki-laki maupun wanita. Namun pada masyarakat Indonesia termasuk masyarakat Kota Bontang, penggunaan alat/cara KB lebih banyak dilakukan oleh perempuan. Hal ini dapat terlihat pada Grafik 3.3. di bawah ini.



Terlihat bahwa empat macam alat/cara KB yang paling banyak digunakan di Kota Bontang adalah alat/cara KB yang diperuntukkan untuk perempuan, yaitu suntikan KB, Pil KB, IUD/spiral, dan MOW/tubektomi. Sedangkan alat/cara KB yang diperuntukkan untuk laki-laki masih sangat jarang digunakan. Tabel 3.10 berikut ini memperlihatkan struktur jenis pilihan alat/cara KB yang digunakan oleh penduduk Kota Bontang dalam rentang tiga tahun terakhir yang menunjukkan pola yang hampir sama.

Tabel 3.10. Persentase Wanita Usia Subur (15—49 Tahun) yang Berstatus Pernah Kawin dan Sedang Menggunakan Alat/Cara KB menurut Jenis Alat/Cara KB yang Digunakan, Tahun 2011—2013

Jenis Alat/Cara KB	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
MOW/tubektomi, MOP/vasektomi	3,06	0,89	7,74
AKDR/IUD/spiral	8,50	14,64	9,82
Suntikan KB	46,43	48,15	51,90
Susuk KB/implanon	3,33	4,51	0,80
Pil KB	32,53	29,94	24,00
Lainnya	6,15	1,88	5,76
Jumlah	100,00	100,00	100,00

r) = angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Ada banyak alasan yang barangkali menjadi penyebab terjadinya pola tersebut, di antaranya faktor pengetahuan dan informasi yang dimiliki oleh pasangan usia subur, faktor jumlah anak yang diinginkan, faktor proses pengambilan keputusan di dalam rumah tangga, dan faktor kemudahan serta biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap jenis alat/cara KB. Oleh sebab itu, pemerintah harus jeli dan berdasarkan data yang lengkap dalam menentukan bentuk kebijakan yang akan diambil dan disesuaikan dengan masing-masing kondisi masyarakat. Program penyuluhan bisa melalui Posyandu dan pemberian brosur mengenai manfaat dan tujuan KB, serta efek samping dari masing-masing alat/cara KB tersebut.

BAB IV. PENDIDIKAN

Pendidikan adalah hak setiap warga Negara Indonesia. Sesuai dengan yang termuat di dalam UUD 1945 Pasal 31 yang mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pengajaran. Hak tentang pendidikan ini juga didukung oleh UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yaitu pada pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu; serta pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Yang dimaksud dengan pendidikan dasar adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau yang sederajat sampai dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau yang sederajat.

Di dalam implementasinya, arah pembangunan bidang pendidikan termuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010—2014, yang menyebutkan bahwa sasaran pembangunan bidang pendidikan ditujukan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan. Sementara itu, Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendidikan menyebutkan bahwa terwujudnya pendidikan tuntas berkualitas menuju masyarakat berbudi luhur dan cerdas sebagai visi yang ingin dicapai.

Pendidikan merupakan sarana untuk membentuk manusia yang terampil, cerdas, produktif dan berbudi luhur sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diukur dengan hasil pendidikan yang telah atau sedang dicapai oleh penduduk. Pelaksanaan program wajib

belajar sembilan tahun telah meningkatkan partisipasi anak, khususnya anak usia sekolah untuk mendapatkan pendidikan dasar.

Upaya pemerintah pusat dalam pengentasan program wajib belajar (Wajar) Pendidikan Dasar sembilan tahun pada tahun 2008 tentu harus didukung sepenuhnya. Pemerintah Kota Bontang telah lebih dulu menetapkan Program Wajar 12 tahun yaitu sejak tahun 2004. Hal ini tertuang di dalam dokumen Kerangka Acuan Bontang Cerdas 2010 yaitu pada indikator pertama yang berbunyi "Rata-rata lama pendidikan masyarakat mencapai 12 tahun". Hal ini berarti bahwa pemerintah Kota Bontang menginginkan pada tahun 2010 semua masyarakat Kota Bontang telah memiliki tingkat pendidikan terendah setingkat SMA/SMK.

Salah satu bentuk keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam menangani masalah pendidikan adalah melalui penancangan Program Bontang Cerdas Tahun 2010. Dengan adanya program ini diharapkan akan tercipta sumber daya manusia berkualitas yang antara lain ditunjukkan melalui penurunan persentase penduduk buta huruf, meningkatnya persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk 15 tahun ke atas, menurunnya rasio murid-guru, dan beberapa indikator lain yang dapat dilihat melalui indikator kesejahteraan rakyat Kota Bontang.

Melalui pendidikan diharapkan nantinya akan dihasilkan sumber daya manusia berkualitas dalam arti memiliki kemampuan manajerial yang handal agar dapat menumbuhkembangkan roda perekonomian daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dalam kerangka otonomi daerah. Untuk dapat mewujudkan pendidikan seperti itu, salah satunya diperlukan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu Dinas Pendidikan Kota Bontang. Namun hal itu juga merupakan tanggung jawab orang tua khususnya dan masyarakat luas pada umumnya.

Untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah Kota Bontang dalam menyukseskan Program Bontang Cerdas 2010 ini, diperlukan adanya berbagai indikator mengenai pendidikan yang lengkap. Beberapa indikator seperti angka melek huruf, tingkat partisipasi sekolah, dan ketersediaan sarana pendidikan akan diulas di bawah ini.

4.1. Tingkat Melek Huruf dan Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan

Kemampuan membaca dan menulis merupakan salah satu modal dasar bagi seseorang untuk meningkatkan pengetahuannya mengenai berbagai hal. Kemampuan membaca dan menulis yang aplikatif, jika disesuaikan dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia adalah kemampuan membaca dan menulis huruf latin.

Pada tingkat makro, ukuran yang sangat mendasar mengenai tingkat pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis (tingkat melek huruf), atau kebalikannya (tingkat buta huruf) pada penduduk berumur 10 tahun ke atas. Tingkat buta huruf dijadikan sebagai indikator bidang pendidikan dengan asumsi bahwa dengan memiliki kemampuan membaca dan menulis, seseorang dapat mempelajari dan menyerap ilmu pengetahuan. Indikator lainnya yang digunakan di bidang pendidikan adalah rata-rata lama sekolah (*Mean Years School*), yaitu rata-rata jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Angka rata-rata lama sekolah sangat bermanfaat untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang ditunjukkan oleh Tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1. Rata-rata Lama Sekolah dan Angka Melek Huruf Kota Bontang, Tahun 2010—2013

Tahun	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka melek huruf	99,20	99,21	99,22	99,25
Rata-rata lama sekolah	10,04	10,38	10,40	10,45

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Angka melek huruf Kota Bontang cukup tinggi yaitu mencapai 99,25 persen pada tahun 2013, atau selalu mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 orang penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bontang, kurang dari 1 persen saja yang buta huruf (tidak dapat menulis dan membaca). Sementara itu, rata-rata lama sekolah penduduk Kota Bontang juga cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kota Bontang pada tahun 2013 terhitung sebesar 10,45 tahun atau mencapai setingkat kelas 2 SLTA. Angka ini dengan jelas menunjukkan bahwa target pendidikan dasar 9 tahun secara nasional telah terlampaui di Kota Bontang.

Selain kedua indikator di atas, terdapat indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas sumber daya manusia suatu wilayah, yaitu jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Dengan melihat jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan menurut jenis kelamin penduduk, dapat terlihat apakah terjadi kesenjangan dalam hal mendapatkan kesempatan bersekolah di masyarakat. Banyak hal yang mempengaruhi jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini, salah satunya adalah ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Tabel 4.2 di bawah ini memperlihatkan persentase penduduk menurut jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan jenis kelamin. Terlihat bahwa persentase penduduk berusia 10 tahun ke atas tertinggi di Kota Bontang pada tahun 2013 adalah penduduk yang menamatkan pendidikan tertinggi pada tingkat SLTA/ sederajat, yaitu sekitar 37,87 persen penduduk laki-laki dan 34,67 persen penduduk perempuan. Persentase tertinggi berikutnya adalah penduduk yang menamatkan pendidikan sampai jenjang SLTP/ sederajat, yaitu sekitar 19,88 persen penduduk laki-laki dan sekitar 19,92 persen penduduk perempuan. Persentase jumlah penduduk yang memiliki ijazah tertinggi setingkat perguruan tinggi, baik diploma, S1, S2, maupun S3, terlihat sedikit lebih tinggi pada penduduk laki-laki dari pada penduduk perempuan, yaitu sekitar 13,41 persen penduduk laki-laki dan sekitar 11,55 persen penduduk perempuan.

Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 10 ke Atas Menurut Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, Tahun 2011–2013

Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Laki-laki			Perempuan		
	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tidak / belum tamat SD	12,63	15,73	12,82	16,11	19,23	15,21
SD/MI/SR	16,61	15,86	16,01	21,94	18,03	18,66
SLTP/MTs	14,81	19,35	19,88	21,08	18,90	19,92
SLTA/MA/SMK	44,91	40,22	37,87	30,80	33,98	34,67
Perguruan Tinggi	11,04	8,84	13,41	10,08	9,86	11,55
Jumlah	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

r) = angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Sementara itu, persentase penduduk yang tidak/belum tamat sekolah dasar terlihat masih cukup tinggi yaitu 12,82 persen penduduk laki-laki dan 15,21 persen penduduk perempuan, namun hal tersebut juga dipengaruhi oleh jumlah penduduk berusia kurang dari 12 tahun yang menurut usianya memang belum menamatkan pendidikan SD/ sederajat. Secara keseluruhan terlihat bahwa pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Kota Bontang telah melebihi target nasional yaitu pendidikan wajib 9 tahun, bahkan sudah mulai mendekati target pemerintah daerah yaitu pendidikan wajib 12 tahun. Hal ini berlaku baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan, yang menandakan sudah makin meratanya peluang mendapatkan pendidikan antara laki-laki dan perempuan.

4.2. Tingkat Partisipasi Sekolah

Bidang pendidikan sampai saat ini masih menempati posisi penting baik di skala nasional maupun daerah, karena pendidikan merupakan suatu modal dasar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sehingga tidak salah apabila dikatakan bahwa pendidikan adalah investasi masa depan suatu bangsa.

Indikator bidang pendidikan yang akan dibahas di dalam subbab ini adalah tingkat partisipasi sekolah. Berdasarkan partisipasi sekolah, penduduk dapat dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu penduduk yang tidak/belum bersekolah, penduduk yang masih bersekolah, dan penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi. Indikator ini dihitung pada kelompok penduduk berusia 5 tahun ke atas. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang dimaksudkan adalah pendidikan formal yang diawali dengan jenjang pendidikan Sekolah Dasar atau yang sederajat, sehingga jenjang pendidikan di bawah itu seperti taman Kanak-kanak, *play group*, atau

pendidikan anak usia dini (PAUD) tidak diperhitungkan. Persentase penduduk menurut partisipasi sekolah dan jenis kelamin ditampilkan oleh Tabel 4.3 di bawah ini.

Tabel 4.3. Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, Tahun 2011—2013

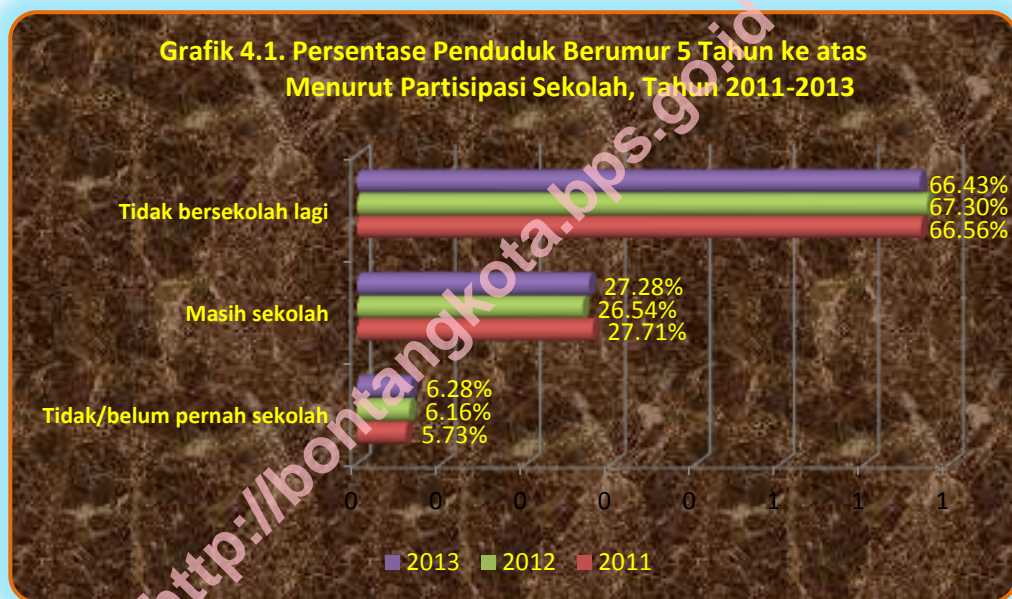
Partisipasi Sekolah	Laki-laki	Perempuan	Total
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
2011^{r)}			
Tidak/belum sekolah	4,48	5,39	4,92
Masih sekolah	25,36	29,14	27,17
Tidak bersekolah lagi	70,16	65,47	67,91
2012^{r)}			
Tidak/belum sekolah	4,52	7,75	6,06
Masih sekolah	26,00	26,84	26,40
Tidak bersekolah lagi	69,48	65,41	67,54
2013			
Tidak/belum sekolah	5,81	6,81	6,28
Masih sekolah	26,98	27,62	27,28
Tidak bersekolah lagi	67,20	65,57	66,43

r) = angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Pada Tabel 4.3. tersebut dapat diamati bahwa pada tahun 2013 sebagian besar penduduk berusia 5 tahun ke atas adalah penduduk yang tidak bersekolah lagi (66,43 persen), baik penduduk laki-laki maupun perempuan yang masing-masing memiliki persentase sebesar 67,20 persen dan 65,57 persen. Hal ini sejalan dengan bentuk struktur penduduk Kota Bontang yang didominasi oleh penduduk berusia 25 tahun ke atas. Penduduk yang masih aktif mengikuti pendidikan di berbagai jenjang pendidikan diperkirakan sebesar 27,28 persen pada tahun 2013,

yaitu sekitar 26,98 persen penduduk laki-laki dan sekitar 27,62 persen penduduk perempuan berusia 5 tahun ke atas. Sementara itu, penduduk yang tidak/belum bersekolah diperkirakan sekitar 6,28 persen yaitu sekitar 5,81 persen penduduk laki-laki dan 6,81 persen penduduk perempuan berusia 5 tahun ke atas. Pola ini terjadi pula pada dua tahun sebelumnya, seperti tampak pada Grafik 4.1. berikut ini.



Indikator partisipasi sekolah di atas tidak membedakan penduduk berdasarkan kelompok umur, sehingga penghitungannya tidak memisahkan antara penduduk yang masih usia sekolah dengan penduduk yang sudah melewati usia sekolah atau belum memasuki usia sekolah. Indikator yang memperhitungkan kelompok umur dan cukup sering digunakan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah proporsi penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu terhadap seluruh penduduk berusia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tersebut. Kesesuaian usia

pada masing-masing jenjang pendidikan yang disepakati adalah usia 7—12 tahun untuk jenjang SD/ sederajat, usia 13—15 tahun untuk jenjang SLTP/ sederajat, usia 16—18 tahun untuk jenjang SLTA/ sederajat, dan usia 19—24 untuk jenjang perguruan tinggi. Dengan demikian, APK untuk SD/ sederajat adalah perbandingan antara penduduk yang masih bersekolah di jenjang SD/ sederajat dengan seluruh penduduk yang berusia 7—12 tahun. Indikator APK tidak mengakomodasi kemungkinan adanya ketidaksesuaian antara umur dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh, misalnya akibat dari terlalu cepat mendaftar sekolah, terlambat mendaftar, atau mengulang kelas. Sehingga hal tersebut menyebabkan nilai APK bisa saja melebihi angka 100. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap masing-masing jenjang pendidikan terhadap penduduk usia sekolah.

Berbeda dengan APK, indikator Angka Partisipasi Murni (APM) memperhitungkan kesesuaian antara kelompok usia dengan jenjang pendidikan yang sedang ditempuh. Sehingga APM digunakan untuk mengukur ketepatan waktu dalam mengenyam pendidikan yang sesuai dengan usianya. APM adalah proporsi penduduk pada kelompok usia yang bersesuaian dengan jenjang pendidikan tertentu dan sedang bersekolah pada jenjang pendidikan tersebut terhadap semua penduduk pada kelompok usia yang sama. Misalnya, APM untuk SLTP/ sederajat adalah perbandingan antara penduduk berusia 13—15 tahun dan sedang bersekolah di jenjang SLTP/ sederajat dengan seluruh penduduk berusia 13—15 tahun.

Sementara itu, indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) juga tidak memperhitungkan kesesuaian antara usia dengan jenjang pendidikan, namun hanya melihat status penduduk yang masih bersekolah pada masing-masing kelompok usia. Misalnya, APS untuk SLTA/ sederajat adalah

perbandingan antara penduduk berusia 16—18 tahun yang berstatus masih bersekolah (tanpa melihat jenjang pendidikan yang sedang diduduki) dengan seluruh penduduk berusia 16—18 tahun. APS dapat digunakan sebagai ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah atau untuk melihat akses penduduk usia sekolah terhadap lembaga pendidikan. Namun demikian, peningkatan APS tidak selalu dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan. Nilai APK, APM, dan APS untuk masing-masing jenjang pendidikan di Kota Bontang pada tahun 2013 ditampilkan pada Tabel 4.4. berikut ini.

Tabel 4.4. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Jenjang Pendidikan Kota Bontang, Tahun 2013

Jenjang Pendidikan	APK	APM	APS
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	98,72	91,64	98,72
SMP/ sederajat	93,84	77,01	96,00
SMU/SMK/ sederajat	101,05	80,62	82,60
Perguruan Tinggi	9,13	6,96	8,04

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Nilai APK tertinggi dimiliki oleh jenjang pendidikan SMU/ sederajat yaitu sebesar 101,05 persen. Hal itu bermakna bahwa jumlah penduduk yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan SMU/ sederajat tanpa memperhitungkan usianya adalah sebanyak 101,05 persen apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk berusia 6—18 tahun. Nilai APK jenjang SMU/ sederajat yang lebih besar dari 100 persen menunjukkan bahwa terdapat penduduk yang berusia di luar rentang 16—18 tahun yang sedang menempuh pendidikan di jenjang SMU/ sederajat. Nilai APK

tertinggi kedua adalah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu sebesar 98,72 persen. Sedangkan nilai APK pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat sedikit lebih rendah yaitu sekitar 93,84 persen.

Apabila dibandingkan dengan nilai APM, nilai APK terlihat sedikit lebih tinggi pada semua jenjang pendidikan. Nilai APM tertinggi adalah pada jenjang pendidikan SD/ sederajat yaitu 91,64 persen. Nilai APM yang lebih kecil apabila dibandingkan dengan nilai APK pada jenjang SD/ sederajat menunjukkan kemungkinan bahwa terdapat anak-anak usia 7—12 tahun yang sudah bersekolah di jenjang SMP/ sederajat mengingat adanya kecenderungan orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka lebih awal (di bawah usia 7 tahun). Hal yang sama pun terlihat pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat yang memiliki nilai APM sebesar 77,01 persen atau lebih rendah sekitar 16,83 persen apabila dibandingkan dengan nilai APKnya. Apabila hal ini dikaitkan dengan nilai APM dan APK pada jenjang pendidikan SMU/ sederajat, maka dapat pula disimpulkan bahwa terdapat penduduk usia 13—15 tahun yang sudah bersekolah di jenjang pendidikan SMU/ sederajat.

Nilai APS terlihat lebih rendah apabila dibandingkan dengan nilai APK di semua jenjang pendidikan, kecuali pada tingkat perguruan tinggi. Hal itu menunjukkan bahwa ada penduduk yang menduduki jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan usianya, baik karena lebih awal memasuki lembaga pendidikan, telat mendaftar, atau mengulang kelas. Terdapat hubungan korelasi terbalik antara nilai APS dengan jenjang pendidikan, yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin rendah nilai APS. Hal itu menunjukkan bahwa pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jumlah penduduk yang bersekolah makin menurun. Biaya, kesadaran, motivasi, budaya, dan ketersediaan sarana pendidikan merupakan beberapa faktor yang dapat menjadi alasan terjadinya hal tersebut.

Nilai APS di jenjang pendidikan SD/ sederajat adalah yang tertinggi yaitu sebesar 98,72 persen. Hal ini bermakna bahwa masih ada sekitar 1,28 persen penduduk usia 7—12 tahun yang tidak bersekolah. Sedangkan nilai APS di jenjang pendidikan SMP/ sederajat dan SMU/ sederajat berturut-turut sebesar 96,00 persen dan 82,60 persen.

4.3. Fasilitas Pendidikan

Keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan perlu didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai dan tenaga pengajar yang mencukupi dan berkualitas. Tanpa keduanya, proses belajar dan mengajar akan mengalami kendala. Oleh sebab itu, terdapat dua indikator dasar yang dapat digunakan, yaitu rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah. Rasio murid-guru menunjukkan jumlah murid yang menjadi beban/tanggung jawab setiap guru, sedangkan rasio murid-sekolah menunjukkan tingkat beban sekolah dalam menampung murid. Rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah pada tingkat SD/ sederajat, SMP/ sederajat, dan SMU/ sederajat disajikan masing-masing oleh Tabel 4.5., Tabel 4.6., dan Tabel 4.7. berikut ini.

Tabel 4.5. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SD/ Sederajat Kota Bontang, Tahun 2013/2014

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	28	8.938	480	18,62	319,21
Bontang Utara	21	7.195	339	21,22	342,62
Bontang Barat	11	4.319	275	15,71	392,64
Jumlah	60	20.452	1.094	18,69	340,87

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

Tabel 4.6. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMP/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2013/2014

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	12	3.682	235	15,67	306,83
Bontang Utara	13	2.582	187	13,81	198,62
Bontang Barat	8	2.692	164	16,41	336,50
Jumlah	33	8.956	586	15,28	271,39

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

Tabel 4.7. Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru SMU/Sederajat Kota Bontang, Tahun 2013/2014

Kecamatan	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru	Rasio Murid-Sekolah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bontang Selatan	8	2.577	201	12,82	322,13
Bontang Utara	11	3.448	297	11,61	313,45
Bontang Barat	6	1.668	138	12,09	278,00
Jumlah	22	7.693	636	12,10	307,72

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bontang

Pada tingkat SD/ sederajat, secara rata-rata setiap guru menangani 18—19 orang murid, sementara setiap sekolah menampung sekitar 340—341 orang murid. Angka tersebut dapat dikatakan cukup ideal dalam kondisi normal. Apabila dilihat menurut kecamatan, terlihat bahwa rasio murid-guru terendah dimiliki oleh Kecamatan Bontang Barat yaitu sekitar 15,71 dan yang tertinggi ada di Kecamatan Bontang Utara yaitu sekitar 21,22. Rasio murid-guru di tiga kecamatan yang tidak berbeda jauh dengan rasio

rata-rata di tingkat Kota Bontang mengindikasikan bahwa persebaran murid dan guru di ketiga kecamatan sudah cukup proporsional. Dengan kata lain, beban setiap guru di semua kecamatan hampir merata. Sementara itu, indikator rasio murid-sekolah terendah ada di Kecamatan Bontang Selatan dan tertinggi di Kecamatan Bontang Barat. Setiap sekolah di Bontang Selatan menampung sekitar 319—320 murid, sedangkan di Bontang Barat sekitar 392—393 orang murid.

Pola yang berbeda terjadi pada jenjang pendidikan setingkat SMP/ sederajat, Kecamatan Bontang Barat memiliki rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah tertinggi apabila dibandingkan dengan dua kecamatan lainnya. Namun rasio terendah pada tingkat ini terdapat di Kecamatan Bontang Utara, yaitu setiap guru rata-rata mengajar 13—14 orang murid dan setiap sekolah menampung sekitar 198—199 orang murid. Secara keseluruhan, rasio murid-guru di Kota Bontang adalah 15,28 dan rasio murid-sekolah adalah sebesar 271,39, atau lebih rendah apabila dibandingkan dengan rasio pada jenjang pendidikan SD/ sederajat.

Rasio murid-guru pada tingkat SMA/ sederajat lebih rendah dari dua jenjang pendidikan di bawahnya, yaitu setiap guru rata-rata hanya mengajar 12—13 orang murid. Namun untuk rasio murid-sekolah di tingkat SMU/ sederajat lebih tinggi dari pada di tingkat SMP dan lebih rendah dari pada rasio di tingkat SD, yaitu rata-rata setiap sekolah SMU/ sederajat di Kota Bontang menampung sekitar 307—308 orang murid. Secara keseluruhan, persebaran guru dan murid di tiga kecamatan pada tingkat SMU/ sederajat sudah cukup proporsional, terlihat pada rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah di semua kecamatan yang tidak berbeda jauh.

Terlepas dari indikator-indikator di atas, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan

sangat ditentukan bukan hanya oleh ketersediaan bangunan sekolah dan guru yang mencukupi serta biaya yang terjangkau, namun juga sangat ditentukan oleh kualitas guru dan kurikulum yang digunakan. Pun begitu pula dengan kualitas bangunan sekolah dan akses yang mudah dilewati. Penetapan visi dan misi pendidikan yang jelas, terarah, dan terukur saja juga belum cukup tanpa adanya keseragaman pemahaman dan keinginan semua pihak yang terlibat di dalam dunia pendidikan itu. Termasuk pula di dalamnya hubungan yang bersinergi antara orang tua dan guru, sehingga tujuan pendidikan yang ditetapkan menjadi tujuan bersama antara orang tua di rumah dan guru di sekolah.

<http://bontangkota.bps.go.id>

BAB V. KESEHATAN

Aspek lain yang penting untuk diperhatikan di dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah faktor kesehatan. Tingkat pendidikan yang tinggi dan kemampuan ekonomi yang baik akan tidak bermakna apabila terjadi gangguan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari. Kondisi kesehatan yang menurun dapat mengakibatkan penurunan kinerja/produktivitas seseorang dalam bekerja. Bahkan pada level tertentu, gangguan kesehatan dapat menyebabkan seseorang tidak mampu beraktivitas dan menjadi beban bagi anggota masyarakat lainnya.

Pada skala nasional, pemerintah telah meluncurkan berbagai program di bidang kesehatan, di antaranya program Jaminan Kesehatan Nasional (Jamkesmas). Bahkan saat ini pemerintah telah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah beroperasi secara bertahap sejak 1 Januari 2014 lalu, baik BPJS kesehatan maupun BPJS ketenagakerjaan. Keterbatasan kemampuan APBN di dalam menjamin seluruh penduduk yang berhak telah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk berpartisipasi melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang.

Sasaran utama pembangunan bidang kesehatan adalah terselenggaranya pelayanan kesehatan yang mudah, murah, bermutu, dan merata untuk semua masyarakat, sehingga terwujudkan masyarakat yang tangguh, sehat, cerdas, kreatif, produktif dan berbudi luhur. Titik berat upaya pembangunan bidang kesehatan ditekankan pada pelayanan kesehatan melalui sarana dan prasarana kesehatan yang ada secara baik dan optimal.

5.1. Fasilitas Kesehatan

Salah satu hal yang mendukung keberhasilan pembangunan bidang kesehatan adalah tersedianya fasilitas kesehatan, antara lain berupa tenaga dan sarana kesehatan yang memadai. Ketersediaan sarana kesehatan di Kota Bontang masih terus dioptimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tabel 5.1. berikut ini memperlihatkan rasio berbagai sarana dan prasarana kesehatan terhadap 10.000 orang penduduk dalam rentang waktu lima tahun terakhir.

Tabel 5.1. Rasio Sarana Kesehatan terhadap 10.000 Penduduk, Tahun 2009—2013

Sarana Kesehatan	2009	2010	2011	2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Balai pengobatan /klinik	0,15	0,28	0,13	0,13	0,24
Puskesmas	0,22	0,21	0,20	0,39	0,37
Puskesmas pembantu	0,15	0,14	0,13	0,13	0,12
Rumah sakit	0,29	0,28	0,34	0,26	0,31
RS. Bersalin	-	-	0,07	0,19	0,18
Apotek	0,92	0,94	1,01	1,10	1,10
Praktek dokter keluarga	0,73	0,56	0,47	0,45	-

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bontang dan BPS Kota Bontang

Jumlah sarana kesehatan yang tersedia di Bontang cukup banyak, baik berupa klinik, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit, dan rumah sakit bersalin. Rasionya terhadap setiap 10.000 orang penduduk berkisar antara 0,12 sampai 0,37 pada tahun 2013. Sarana kesehatan tersebut

juga didukung dengan adanya apotek yang rasionya terhadap 10.000 orang penduduk mencapai 1,10. Sejak 1 Januari 2012 lalu, Pemerintah Kota Bontang pun telah mengembalikan fungsi puskesmas menjadi puskesmas keluarga yaitu dengan menggabungkan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dengan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

5.2. Kesehatan Balita

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu proses panjang yang harus dilakukan secara bertahap, bukan secara spontan dan dalam waktu pendek. Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia, pembentukan sumber daya manusia berkualitas hendaknya dimulai sejak dari dalam kandungan. Kecukupan gizi selama di dalam kandungan sangat penting untuk diperhatikan. Setelah itu, proses kelahiran juga memegang peranan penting dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Kesalahan penanganan saat proses kelahiran bisa saja berakibat fatal mulai dari terganggunya tingkat kesehatan bayi sampai pada terjadinya kematian bayi atau ibu. Proses kelahiran bayi adalah proses lahirnya janin dari dalam kandungan ibu ke dunia, dimulai dari tanda-tanda kelahiran (rasa mulas yang berangsur-angsur makin sering, makin lama dan makin kuat, rahim terasa kencang, keluarnya lendir bercampur darah dari jalan lahir (vagina), keluarnya cairan ketuban yang berwarna jernih kekuningan dari jalan lahir dan merasa seperti mau buang air besar bila bayi akan lahir), hingga lahirnya bayi, pemotongan tali pusat, dan keluarnya plasenta. Seorang ibu yang melahirkan bisa ditolong oleh lebih dari satu jenis penolong (misalnya dukun bersalin dan bidan). Tabel 5.2. berikut ini memperlihatkan penolong proses kelahiran bayi di Kota Bontang, baik pada proses pertama maupun pada proses terakhir kelahiran.

Tabel 5.2. Persentase Penolong Proses Kelahiran Menurut Urutan Pertolongan, Tahun 2012—2013

Penolong Kelahiran	2012 ^{r)}		2013	
	Pertama	Terakhir	Pertama	Terakhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dokter	30,47	31,68	30,03	31,06
Bidan/tenaga medis lain	64,05	65,79	64,69	66,76
Dukun	2,25	2,54	3,49	2,18
Famili/lainnya	3,22	-	1,79	-
Total	100,00	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

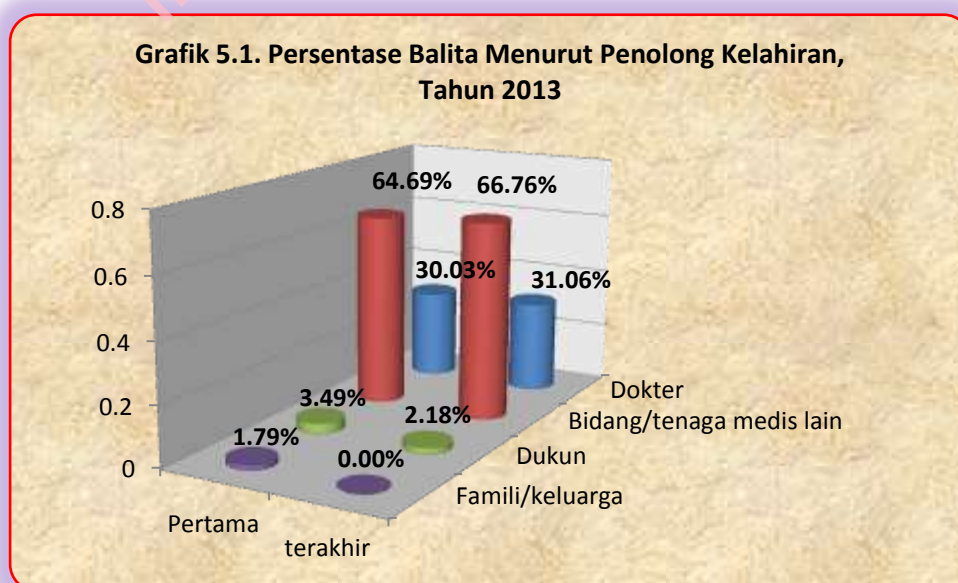
Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Bidan atau tenaga medis lainnya selain dokter menjadi penolong kelahiran yang paling banyak dipilih oleh penduduk Kota Bontang. Hal ini terlihat pada persentase penduduk yang memilih bidan/tenaga medis lainnya sebagai penolong proses pertama kelahiran, yaitu sebanyak 64,05 persen pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 64,69 persen pada tahun 2013. Begitu pula pada proses terakhir kelahiran, penduduk yang memilih bidan/tenaga medis lainnya mencapai 66,76 persen pada tahun 2013. Sementara itu penduduk yang memilih dokter sebagai penolong proses kelahiran juga cukup tinggi, yaitu sekitar 30,03 persen pada proses pertama dan meningkat menjadi 31,06 persen pada proses terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan penduduk Kota Bontang terhadap dokter dan bidan/tenaga medis sudah cukup tinggi. Tentu saja hal ini juga terkait dengan makin meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai kesehatan.

Namun demikian, masih ada penduduk yang memilih dukun sebagai penolong pada proses pertama kelahiran yaitu sekitar 3,49 persen pada

proses pertama dan menjadi 2,18 persen pada proses terakhir. Hal tersebut tentu saja perlu menjadi perhatian pemerintah. Dengan menjalin kerjasama antara tenaga medis dan dukun beranak berupa pelatihan dan pembinaan, maka keterampilan dan pemahaman dukun mengenai penanganan proses kelahiran sampai pasca kelahiran dapat ditingkatkan dan disesuaikan dengan kaidah-kaidah ilmu kesehatan. Selain itu, masih ada proses kelahiran yang ditangani oleh anggota keluarga atau orang lain yang bukan ahli di dalam menangani kelahiran. Pada proses pertama sebanyak 1,79 persen proses kelahiran ditangani oleh famili/lainnya. Namun pada proses terakhir beralih ke tenaga lainnya yang lebih berkompeten. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain tingkat kesadaran dan kepercayaan terhadap tenaga medis, biaya persalinan, dan jarak tempat tinggal dengan sarana kesehatan.

Perbandingan antara penolong pertama dan terakhir pada proses kelahiran di Kota Bontang diperlihatkan dengan lebih jelas oleh Grafik 5.1. di bawah ini.



Pasca proses kelahiran, salah satu faktor penting yang mempengaruhi kualitas sumber daya manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI) kepada bayi. ASI dipercaya sebagai asupan gizi terbaik karena dapat menjaga daya tahan tubuh seorang balita. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemberian ASI secara eksklusif selama 6 bulan mampu meningkatkan kekebalan tubuh bayi sehingga tidak rentan terhadap berbagai penyakit. Tabel 5.3. dibawah ini memberikan gambaran mengenai persentase balita menurut pemberian ASI di Kota Bontang.

Tabel 5.3. Persentase Balita Menurut Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2011–2013

Jenis Kelamin	2011 ^{r)}		2012 ^{r)}		2013	
	Diberi ASI	Tidak Diberi ASI	Diberi ASI	Tidak Diberi ASI	Diberi ASI	Tidak Diberi ASI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laki-laki	95,49	4,51	90,11	9,89	94,94	5,06
Perempuan	98,60	1,40	89,44	10,56	94,95	5,05

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Tingkat kesadaran masyarakat Kota Bontang mengenai pentingnya ASI bagi tumbuh kembang balita sudah cukup tinggi, terlihat pada persentase jumlah balita yang diberi ASI yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2013 sebanyak 94,94 persen balita laki-laki dan 94,95 persen balita perempuan pernah diberi ASI. Namun demikian, jumlah balita yang sama sekali tidak pernah diberi ASI pun dapat dikatakan masih tinggi, yaitu sebanyak 5,06 persen balita laki-laki dan 5,05 persen balita perempuan tidak pernah diberi ASI. Tentunya hal itu harus dilihat secara mendetil pada masing-masing kasus, sehingga dapat diketahui penyebab dan solusi terbaik dalam penyelesaiannya.

Pada umumnya seorang bayi diberi ASI selama dua tahun, namun karena berbagai sebab bisa saja lama pemberian ASI menjadi kurang atau malah lebih dari dua tahun. Dilihat berdasarkan lamanya pemberian ASI, jumlah balita yang diberi ASI selama enam bulan ke atas cukup tinggi di Kota Bontang. Balita yang diberi ASI selama 6 bulan sampai 1 tahun mencapai 27,73 persen pada tahun 2013. Sedangkan balita yang diberi ASI selama 13—17 bulan dan 18—23 bulan berturut-turut adalah sekitar 12,38 persen dan 8,45 persen. Hal itu diperlihatkan secara lebih detil oleh Tabel 5.4. berikut ini.

Tabel 5.4. Persentase Balita Menurut Lama Pemberian ASI dan Jenis Kelamin, Tahun 2012—2013

Lama Pemberian ASI (Bulan)	2012 ^{r)}			2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
≤ 5	15,80	21,01	18,25	19,47	19,35	19,41
6-12	28,39	26,57	27,80	22,68	32,62	27,73
13-17	9,77	10,38	10,06	11,20	13,53	12,38
18-23	12,35	9,16	10,85	9,41	7,51	8,45
24+	33,19	32,89	33,05	37,23	26,98	32,03
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Cukup menarik bahwa jumlah balita yang diberi ASI lebih dari dua tahun cukup tinggi di Kota Bontang, mencapai 33,05 persen di tahun 2012 dan 32,03 persen di tahun 2013. Namun demikian, jumlah balita yang diberi ASI selama kurang dari enam bulan pun masih cukup tinggi, yaitu mencapai 18,25 persen di tahun 2012 dan 19,41 persen pada tahun 2013.

5.3. Angka Kesakitan

Angka kesakitan (morbiditas) adalah persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan, sehingga indikator ini merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan. Makin banyak penduduk yang mengalami keluhan kesehatan, menunjukkan makin rendah derajat kesehatan penduduk yang bersangkutan. Segala informasi mengenai derajat kesehatan masyarakat dapat menjadi pertimbangan dalam pembangunan bidang kesehatan sehingga semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, murah, dan merata, dan derajat kesehatan masyarakat yang lebih baik dapat dicapai. Tabel 5.5. di bawah ini menunjukkan persentase penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan kesehatan.

Tabel 5.5. Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Keluhan Kesehatan, Tahun 2012—2013

Keluhan Kesehatan	2012 ^{r)}			2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ada keluhan	25,56	29,28	27,33	22,46	24,58	23,47
Tidak ada keluhan	74,44	70,72	72,67	77,54	75,42	76,53
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Terlihat bahwa dalam dua tahun terakhir sekitar seperempat penduduk Kota Bontang mengalami keluhan kesehatan, yaitu sekitar 23,47 persen di tahun 2013 atau menurun apabila dibandingkan dengan persentase tahun sebelumnya yang sekitar 27,33 persen. Apabila dilihat berdasarkan jenis

kelamin, persentase penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk laki-laki. Hal itu cukup wajar mengingat bahwa seorang wanita mengalami siklus bulanan (menstruasi) dan proses kehamilan yang berpeluang menimbulkan keluhan kesehatan.

Keluhan kesehatan yang dialami oleh seseorang dapat disebabkan oleh satu jenis penyakit atau beberapa jenis penyakit sekaligus. Tabel 5.6. berikut ini menunjukkan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berdasarkan jenis keluhan yang dialami.

Tabel 5.6. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Keluhan Kesehatan, Tahun 2012—2013

Jenis Keluhan Kesehatan	2012 ^{r)}			2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panas	33,12	28,23	30,63	31,72	32,73	32,23
Batuk	53,25	45,42	49,26	49,48	43,93	46,72
Pilek	48,74	46,59	47,64	41,70	48,80	45,24
Asma/napas sesak/cepat	3,33	2,70	3,01	3,53	2,09	2,81
Diare/buang-buang air	2,39	1,33	1,85	1,26	0,50	0,88
Sakit kepala berulang	12,14	17,92	15,09	7,31	8,69	8,00
Sakit gigi	3,13	3,10	3,11	1,67	5,11	3,39
Lainnya	33,79	37,59	35,73	33,37	33,89	34,13

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Jenis penyakit yang paling banyak dikeluhkan oleh penduduk Kota Bontang adalah batuk dan pilek. Keluhan batuk dialami oleh 49,48 persen penduduk laki-laki dan 43,93 persen penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2013. Sedangkan keluhan pilek dialami oleh 41,70 persen penduduk laki-laki dan 48,80 persen penduduk perempuan yang mengalami keluhan kesehatan.

Keluhan terbanyak berikutnya adalah disebabkan oleh penyakit lainnya dan panas. yang termasuk ke dalam kategori penyakit lainnya di antaranya adalah campak, telinga berair, sakit kuning, kejang-kejang, dan lain-lain, termasuk penyakit kronis yang diidap oleh penduduk meskipun pada saat pencacahan sedang tidak kambuh. Penyakit panas dikeluhkan oleh sekitar 32,23 persen penduduk yang mengalami keluhan kesehatan dan penyakit lainnya dikeluhkan oleh 34,13 persen penduduk.

Panas, batuk, dan pilek merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang mudah berkembang biak di daerah tropis. Kota Bontang yang terletak di garis katulistiwa mungkin menjadi tempat berkembang biak yang nyaman bagi virus-virus tersebut. Meskipun bukan tergolong penyakit yang parah, namun ketiga jenis gangguan ini dapat mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari yang pada akhirnya dapat mengurangi produktivitas perekonomian. Oleh sebab itu, pencegahan terhadap ketiga jenis penyakit tersebut perlu mendapat perhatian.

Keluhan kesehatan yang dialami oleh seseorang dapat menyebabkan aktivitas sehari-seharinya, mulai dari menurunnya kinerja sampai pada berhentinya aktivitas secara total. Makin lama gangguan tersebut dirasakan makin besar dampak negatif yang dapat ditimbulkannya. Pada Tabel 5.7. berikut ini dapat dilihat persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan berdasarkan lamanya gangguan yang dirasakan, baik pada penduduk laki-laki maupun perempuan.

Tabel 5.7. Persentase Penduduk yang Mengalami Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Lamanya Gangguan, Tahun 2012–2013

Lama Gangguan (hari)	2012 ^{r)}			2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<4	56,21	69,69	62,51	58,04	68,75	63,31
4–7	28,83	21,77	25,53	24,46	26,43	25,43
8+	14,96	8,54	11,96	17,50	4,82	11,26
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Sebagian besar penduduk yang mengalami keluhan kesehatan merasakan gangguan selama kurang dari 4 hari, yaitu 58,04 persen penduduk laki-laki dan 68,75 persen penduduk perempuan. Berikutnya, penduduk yang mengalami gangguan antara empat hari sampai seminggu adalah sebanyak 25,43 persen yang terdiri atas 25,46 penduduk laki-laki dan 26,43 persen penduduk perempuan. Sementara itu, gangguan selama lebih dari seminggu dialami oleh sekitar 11,26 persen penduduk.

Sebagian penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berinisiatif untuk mengobati sendiri penyakitnya tanpa berkonsultasi kepada tenaga kesehatan. Biasanya keputusan tersebut diambil berdasarkan jenis penyakit dan lamanya gangguan yang dirasakan. Jenis obat yang dipilih pun berbeda-beda, bisa berupa obat modern, obat tradisional, atau obat lainnya (misalnya suplemen atau minuman tonik). Pilihan obat pun dapat dipengaruhi oleh pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau pengaruh iklan. Tabel 5.8. berikut ini menggambarkan persentase penduduk yang mengobati sendiri keluhan kesehatan yang dirasakan.

Tabel 5.8. Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2012—2013

Apakah Mengobati Sendiri	2012			2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ya	50,10	51,90	51,02	57,15	51,40	54,29
Tidak	49,90	48,10	48,98	42,85	48,60	45,71
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Pada Tabel 5.8 di atas terlihat bahwa lebih dari setengah (54,29 persen) penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan kesehatan berusaha mengobati sendiri keluhannya tanpa didahului dengan pemeriksaan atau berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Apabila dirinci berdasarkan jenis kelamin, persentase penduduk laki-laki yang mengobati sendiri penyakitnya adalah sekitar 57,15 persen dan persentase penduduk perempuan sedikit lebih rendah yaitu sekitar 51,40 persen. Angka yang cukup tinggi tersebut dapat dikatakan wajar mengingat jenis keluhan kesehatan yang paling banyak dirasakan oleh penduduk Kota Bontang adalah penyakit yang cukup sering diderita oleh masyarakat di wilayah tropis seperti Indonesia yaitu batuk, pilek, dan panas. Hal itu didukung pula oleh banyaknya jenis obat-obatan yang diklaim dapat mengobati penyakit-penyakit tersebut yang beredar secara bebas di masyarakat, sehingga untuk mendapatkannya sangat mudah dengan cara membeli di apotek atau toko obat. Sementara itu, persentase penduduk berdasarkan jenis obat yang dipilih untuk mengobati sendiri keluhan kesehatannya diperlihatkan oleh Tabel 5.9. di bawah ini.

Tabel 5.9. Persentase Penduduk yang Mengobati Sendiri Keluhan Kesehatan Menurut Jenis Kelamin dan Jenis Obat yang Digunakan, Tahun 2012—2013

Jenis Obat yang Digunakan	2012 ^{r)}			2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tradisional	27,65	32,42	30,12	25,55	24,93	25,26
Modern	87,24	86,57	86,89	80,88	79,02	80,01
Lainnya	3,75	1,87	2,77	4,63	1,04	2,94

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Pada Tabel 5.9. tersebut terlihat bahwa jenis obat yang paling banyak dipilih oleh penduduk Kota Bontang yang mengalami keluhan kesehatan untuk mengobati penyakitnya adalah obat modern. Di tahun 2012 tercatat sekitar 86,89 persen penduduk Kota Bontang yang mengobati sendiri penyakitnya memilih obat modern dan diikuti oleh sekitar 30,12 persen yang memilih obat tradisional. Sedangkan obat lainnya dipilih oleh sekitar 2,77 penduduk yang mengobati sendiri penyakitnya. Pola yang sama masih berlanjut pada tahun 2013, yaitu obat modern dipilih oleh sekitar 80,01 persen penduduk yang mengobati sendiri penyakitnya dan obat tradisional dipilih oleh sekitar 25,26 persen penduduk. Apabila dilihat berdasarkan jenis kelamin, terlihat bahwa pola kecenderungan yang sama dalam pemilihan obat pada penduduk laki-laki dan perempuan dalam kurun waktu dua tahun terakhir.

BAB VI. KETENAGAKERJAAN

Kota Bontang adalah kota dengan laju pertumbuhan penduduk cukup tinggi. Laju pertumbuhan penduduk kota ini sebagian besar disebabkan oleh migrasi. Hal tersebut disebabkan oleh tingginya daya tarik Kota Bontang bagi para pencari kerja sebagai tempat beradanya dua industri besar dan berdekatan dengan lokasi beberapa pertambangan batubara. Dengan kondisi tersebut sudah selayaknya Kota Bontang memiliki aturan dan kebijakan yang jelas mengenai ketenagakerjaan.

Berdasarkan usianya, penduduk dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar yaitu penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) dan penduduk bukan usia kerja (0–14 tahun). Penduduk usia kerja juga dibedakan menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang dikelompokkan sebagai bukan angkatan kerja adalah penduduk yang beraktivitas sekolah, mengurus rumah tangga, dan penduduk yang sudah tidak mampu bekerja, baik karena alasan kesehatan atau usia (misalnya pensiunan dan penerima pendapatan). Sedangkan angkatan kerja terdiri atas penduduk yang bekerja dan penduduk yang aktif berusaha mencari pekerjaan (pengangguran).

Besarnya angkatan kerja mencerminkan besarnya penawaran tenaga kerja. Namun besarnya penawaran belum tentu sebanding dengan besarnya permintaan terhadap tenaga kerja. Akibatnya, akan ada angkatan kerja yang tidak/belum terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia atau yang disebut dengan pengangguran. Meskipun pengangguran tidak selalu berkorelasi positif dengan kemiskinan, namun penanganan terhadap tenaga kerja yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan ini tetap perlu mendapat perhatian khusus. Tanpanya, tidak

menutup kemungkinan hal itu akan menimbulkan berbagai masalah seperti kerawanan sosial.

6.1. Keadaan Angkatan Kerja

Angkatan kerja berada pada dua posisi penting dalam pembangunan, yaitu sebagai subyek sekaligus obyek. Peningkatan jumlah angkatan kerja apabila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah di dalam pembangunan. Perluasan kesempatan kerja bukan hanya penting dari sisi ekonomi, namun juga sosial. Selain menciptakan lapangan kerja baru, upaya memperluas kesempatan kerja juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Kondisi ketenagakerjaan dapat dilihat dari berbagai indikator, antara lain Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK). Indikator TPAK merupakan perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi (bekerja dan atau mencari pekerjaan) dengan seluruh penduduk usia kerja. Indikator ini menunjukkan jumlah penduduk yang potensial untuk dapat menghasilkan barang dan jasa. Makin besar nilai TPAK menunjukkan makin besar jumlah penduduk yang terlibat dan berusaha terlibat di dalam kegiatan produksi barang dan jasa pada suatu waktu tertentu.

Indikator TPT merupakan persentase penduduk usia kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan terhadap jumlah keseluruhan angkatan kerja. Sedangkan TKK adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja. Tabel 6.1. di bawah ini menyajikan kondisi ketenagakerjaan Kota Bontang dalam tiga tahun terakhir. Pada tabel tersebut dapat dilihat ketiga indikator di atas.

Tabel 6.1. Persentase Penduduk Usia Kerja (15 Tahun ke Atas) Menurut Kegiatan Utama, Tahun 2011—2013

Kegiatan Utama	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Angkatan Kerja (TPAK)	68,00	73,00	65,86
Bekerja (TKK)	85,84	85,61	88,95
Mencari Pekerjaan (TPT)	14,16	14,39	11,05
Bukan Angkatan Kerja	32,00	27,00	34,14
Sekolah	19,98	31,40	34,20
Mengurus rumah tangga	73,48	62,08	57,38
Lainnya	6,54	6,52	8,42
Jumlah	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Jumlah angkatan kerja di Kota Bontang cukup besar, mencapai 65,86 persen dari seluruh penduduk usia kerja pada tahun 2013. Sisanya sebesar 34,14 persen merupakan penduduk bukan angkatan kerja yang terdiri atas penduduk yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan melakukan kegiatan lainnya. Di antara penduduk yang bukan angkatan kerja, penduduk yang beraktivitas mengurus rumah tangga merupakan jumlah terbesar, mencapai 57,38 persen dari seluruh penduduk bukan angkatan kerja. Jumlah kedua terbesar ditempati oleh penduduk yang melakukan aktivitas sekolah, yaitu sekitar 34,20 persen. Sedangkan penduduk yang melakukan aktivitas lainnya berjumlah sekitar 8,42 persen dari seluruh penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk yang melakukan kegiatan lainnya ini biasanya terdiri atas penduduk yang telah memasuki masa pensiun, penduduk yang sakit sehingga tidak mampu bekerja, dan penduduk penerima pendapatan.

Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) Kota Bontang terlihat cukup tinggi, mencapai 88,95 persen pada tahun 2013. Meskipun angka TKK mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, namun tidak terlalu signifikan. Sedangkan angka TPT yang merupakan persentase penduduk yang menganggur terlihat masih cukup tinggi pada tahun 2011—2012 dan menurun dengan cukup berarti pada tahun 2013. Indikator TPT yang sebesar 11,05 persen pada tahun 2013 menunjukkan bahwa terdapat sekitar 11,05 persen penduduk usia kerja yang aktif berusaha mencari pekerjaan pada masa periode pencacahan.

Terkait dengan angka pengangguran, terdapat kekurangtepatan penafsiran yang cukup sering terjadi, yaitu pengangguran dikaitkan secara langsung dengan kemiskinan. Angka pengangguran yang tinggi seringkali diasosiasikan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi pula. Apabila kembali ke konsep mengenai bekerja yang telah disampaikan pada Bab II, hal ini dapat dipahami dengan lebih baik. Seseorang yang menganggur biasanya adalah mereka yang berpendidikan menengah atau tinggi. Sedangkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari masih bisa ditanggung oleh anggota rumah tangga lainnya atau dari tabungan. Sementara itu, rumah tangga miskin jarang sekali yang menganggur. Kalaupun ada, jumlahnya sangat kecil. Hal tersebut adalah karena apabila menganggur maka mereka tidak bisa makan. Oleh sebab itu, meskipun secara serabutan dan dalam jam kerja yang rendah, rumahtangga miskin biasanya bekerja atau tidak menganggur.

6.2. Lapangan Usaha Utama

Seseorang dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan yang dibedakan menjadi pekerjaan utama dan pekerjaan tambahan. Pekerjaan utama adalah pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak, namun apabila

dua pekerjaan atau lebih menggunakan waktu yang sama maka pekerjaan utama adalah pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar. Pekerjaan utama dikelompokkan menjadi beberapa lapangan usaha berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009, seperti pada Tabel 6.2. berikut ini.

Tabel 6.2. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Utama, Tahun 2013

Lapanga Usaha Utama	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian	16,66	1,30	11,76
Pertambangan dan Penggalian	12,28	-	8,36
Industri Pengolahan	4,31	3,12	3,93
Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,74	-	0,51
Konstruksi	16,42	1,67	11,71
Perdagangan, Hotel, dan Restoran	17,92	56,95	30,37
Angkutan dan komunikasi	6,04	3,16	5,12
Bank, Lembaga Keuangan, dan Jasa Perusahaan	4,85	0,77	3,55
Jasa-jasa Lainnya	20,78	33,04	24,69
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Lapangan usaha Perdagangan, Hotel, dan Restoran menyerap tenaga kerja terbesar di Kota Bontang pada tahun 2013, yaitu mencapai 30,37 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang ada. Berdasarkan jenis kelaminnya, persentase penduduk perempuan jauh lebih banyak yang

terlibat di dalam lapangan usaha ini apabila dibandingkan dengan penduduk laki-laki. Terdapat sekitar 56,95 persen penduduk perempuan yang bekerja di sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran. Sedangkan penduduk laki-laki hanya sekitar 17,92 persen.

Jumlah tenaga kerja terbesar kedua berada pada Lapangan Usaha Jasa-jasa Lainnya. Yang termasuk ke dalam lapangan usaha ini antara lain administrasi pemerintahan dan pertahanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa sosial kemasyarakatan, dan jasa perorangan yang melayani rumah tangga. Sekitar 24,69 persen tenaga kerja Kota Bontang berada pada lapangan usaha ini. Penduduk perempuan juga mendominasi pada lapangan usaha ini, yaitu sekitar 33,04 persen dan penduduk laki-laki sekitar 20,78 persen.

Jumlah tenaga kerja tertinggi berikutnya berada pada Lapangan Usaha Pertanian, yaitu sekitar 11,76 persen. Hal ini dipengaruhi oleh luas wilayah Kota Bontang yang hampir 70 persen merupakan wilayah laut, sehingga sektor perikanan yang merupakan bagian dari Lapangan Usaha Pertanian cukup tinggi menyerap tenaga kerja. Berbeda dengan dua lapangan usaha sebelumnya, tenaga kerja laki-laki pada sektor pertanian lebih mendominasi yaitu sekitar 16,66 persen. Sedangkan tenaga kerja perempuan hanya sekitar 1,30 persen dari seluruh tenaga kerja perempuan yang ada.

Konstruksi, dan Pertambangan dan penggalian merupakan dua lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja tertinggi berikutnya. Konstruksi menyerap sekitar 11,71 persen tenaga kerja, sedangkan pertambangan dan penggalian menyerap sekitar 8,36 persen tenaga kerja. Sektor konstruksi dipengaruhi oleh penambahan jumlah penduduk yang cukup cepat, sehingga permintaan tempat tinggal tinggi. Sesuai dengan sifat pekerjaannya yang membutuhkan kekuatan fisik, tenaga kerja laki-laki

mendominasi pada kedua lapangan usaha ini, yaitu 16,42 persen pada sektor konstruksi dan 12,28 pada sektor pertambangan dan penggalian. Sementara itu tenaga kerja perempuan jumlahnya sangat kecil. Hal yang menarik dari tenaga kerja di sektor pertambangan ini adalah bahwa pada struktur ekonomi Kota Bontang sendiri sebenarnya tidak terdapat lapangan usaha pertambangan, khususnya pertambangan bukan migas. Lapangan usaha sektor pertambangan dimiliki oleh wilayah kabupaten lain yang ada di sekitar Kota Bontang. Sedangkan tenaga kerjanya banyak yang memilih menetap dan tinggal sebagai penduduk Kota Bontang karena lebih dekat dan mudah untuk menjangkau berbagai fasilitas yang cukup layak, seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan.

Di Kota Bontang terdapat dua perusahaan industri berskala internasional, yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur (PKT) sebagai penghasil pupuk, dan PT. Badak NGL yang memproduksi gas alam cair. Kegiatan kedua perusahaan ini termasuk ke dalam Lapangan Usaha Industri Pengolahan. Penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha ini adalah sebesar 3,93 persen. Apabila dilihat menurut jenis kelaminnya, tenaga kerja perempuan yang terserap pada lapangan usaha ini adalah sebesar 3,12 persen dan tenaga kerja laki-laki sebesar 4,31 persen. Kedua perusahaan ini memiliki peran yang besar bukan hanya terhadap penyerapan tenaga kerja namun juga terhadap perekonomian Kota Bontang. Adanya kedua perusahaan tersebut memacu munculnya usaha-usaha pendukung baik di sektor industri, konstruksi, perdagangan, maupun jasa.

6.3. Status Pekerjaan

Kedudukan seseorang di dalam pekerjaannya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok, yaitu berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar,

buruh/karyawan/pegawai, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Kedudukan sebagai berusaha, baik sendiri maupun dibantu oleh buruh, merupakan bentuk pekerjaan yang menanggung resiko secara ekonomis seperti tidak kembalinya modal dan mendapatkan laba/rugi. Sedangkan kedudukan sebagai buruh/karyawan/pegawai adalah apabila seseorang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Status sebagai pekerja bebas hampir sama dengan buruh/karyawan/pegawai dengan perbedaannya adalah bahwa pekerja bebas tidak mempunyai majikan tetap (berganti-ganti majikan) atau memiliki lebih dari satu majikan dalam satu waktu secara bersamaan. Sementara itu, pekerja keluarga/tidak dibayar adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapatkan upah/gaji, baik berupa uang maupun barang. Pekerja keluarga biasanya adalah anggota rumah tangga orang yang berusaha, misalnya istri/suami, anak, adik/kakak, keponakan, atau famili lainnya.

Berdasarkan status pekerjaan, tenaga kerja Kota Bontang pada tahun 2013 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai, yaitu sekitar 56,78 persen, tidak berbeda jauh dengan tahun sebelumnya yang mencapai 58,93 persen. Hal itu berlaku baik pada tenaga kerja laki-laki maupun tenaga kerja perempuan seperti yang terlihat pada Tabel 6.3. di bawah ini. Sebanyak 62,03 persen tenaga kerja laki-laki dan sekitar 45,58 persen tenaga kerja perempuan merupakan buruh/karyawan/pegawai pada tahun 2013. Hal ini sejalan dengan ketersediaan jenis lapangan usaha yang memiliki daya serap tenaga kerja tertinggi di Kota Bontang yaitu sektor jasa-jasa lainnya yang terdiri atas sektor administrasi pemerintahan dan pertahanan, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan jasa sosial kemasyarakatan, yang sebagian besar tenaga kerjanya adalah buruh/karyawan.

Tabel 6.3. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan, Tahun 2012—2013

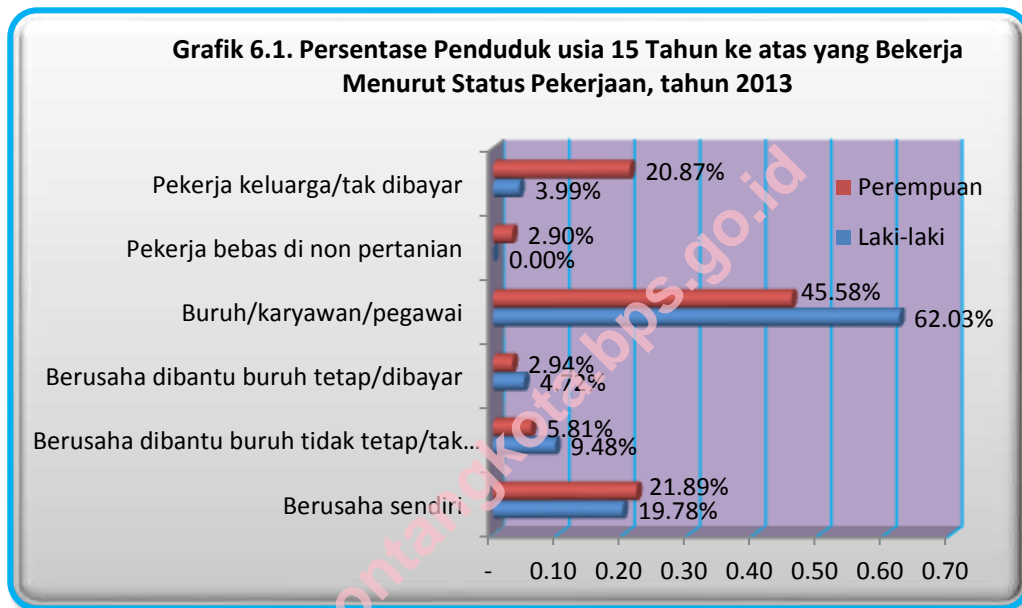
Status Pekerjaan	2012 ^{r)}			2013		
	Laki-laki	Perempuan	Total	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Berusaha sendiri	12,76	12,85	12,79	19,78	21,89	20,46
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar	8,70	6,20	7,84	9,43	5,81	8,31
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	5,12	3,13	4,43	4,72	2,94	4,15
Buruh/karyawan/pegawai	68,93	39,95	58,93	62,03	45,58	56,78
Pekerja bebas	1,20	1,30	1,23	-	2,90	0,93
Pekerja keluarga/tidak dibayar	3,30	36,57	14,78	3,99	20,87	9,38
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

r) = Angka revisi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Bontang

Meskipun didominasi oleh tenaga kerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai, namun minat berwirausaha di Kota Bontang masih cukup tinggi. Hal ini terlihat pada jumlah tenaga kerja yang memilih untuk berusaha sendiri yang sebesar 20,46 persen dari seluruh tenaga kerja yang ada. Apabila dilihat menurut jenis kelaminnya, terlihat kondisi yang berimbang antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan, yaitu sekitar 19,78 persen tenaga kerja laki-laki dan 21,89 persen tenaga kerja

perempuan merupakan tenaga kerja yang berusaha sendiri. Grafik 6.1. berikut memperlihatkan perbandingan persentase jumlah tenaga kerja berdasarkan jenis kelamin pada masing-masing status kedudukan tenaga kerja di dalam pekerjaannya pada tahun 2013.



Sementara itu, tenaga kerja yang berusaha dengan dibantu buruh/karyawan berjumlah sekitar 12,46 persen dari seluruh tenaga kerja. Dari jumlah itu, sekitar 8,31 persen berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap/tidak dibayar dan sekitar 4,15 persen dibantu buruh oleh tetap/buruh dibayar. Tenaga kerja yang berusaha dibantu oleh buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar jauh lebih banyak apabila dibandingkan dengan yang berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, hal ini sejalan dengan kondisi cukup tingginya jumlah pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar di Kota Bontang, yaitu sekitar 9,38 persen. Sebagai bagian dari bangsa Timur, sebagian besar penduduk Indonesia menganut budaya bahwa bekerja dan mencari nafkah adalah kewajiban laki-laki. Sedangkan perempuan mempunyai keleluasaan untuk memilih ikut bekerja di luar rumah atau tidak. Sehingga sebagian tenaga kerja perempuan di samping mengurus rumah tangga, juga bekerja membantu suami atau anggota

rumah tangga lainnya sebagai pekerja yang tidak dibayar/pekerja keluarga. Hal itu terlihat dari lebih tingginya persentase tenaga kerja perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga apabila dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Struktur tenaga kerja berdasarkan status pekerjaannya ditampilkan dengan lebih jelas oleh Grafik 6.1. berikut ini.

<http://bontangkota.bps.go.id>

BAB VII. P E R U M A H A N

Kebutuhan papan atau rumah adalah salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, komunikasi, pendidikan dan transportasi. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya. Sedangkan perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman baik di perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.

Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam perumahan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Oleh sebab itu pemerintah perlu lebih berperan dalam menyediakan, memberikan kemudahan dan bantuan perumahan bagi masyarakat. Tentu saja hal ini dengan tetap memperhatikan keseimbangan bagi kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan status kelayakan sebuah rumah. Indikator-indikator tersebut antara lain luas lantai yang ditempati, jenis atap terluas, jenis dinding terluas, dan kepemilikan sarana dan prasarana penunjang lainnya seperti listrik, air minum, dan tempat pembuangan air besar.

7.1. Kondisi Perumahan

Setiap orang memiliki hak untuk bertempat tinggal atau menghuni rumah. Yang dimaksud dengan hak menghuni tersebut dapat berupa hak milik, sewa, atau cara lain selain sewa. Berdasarkan status penguasaannya maka rumah dibedakan menjadi rumah milik sendiri, rumah sewa/kontrak, dan rumah lainnya, misal rumah bebas sewa atau rumah dinas. Tabel 7.1. di bawah ini menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan status kepemilikan rumah di Kota Bontang.

Tabel 7.1. Persentase Rumah Tangga Menurut Status Kepemilikan Rumah di Kota Bontang, Tahun 2011—2013

Status Kepemilikan Rumah	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Milik sendiri	62,39	62,59	61,08
Kontrak/sewa	26,88	25,94	30,36
Lainnya	10,73	11,46	8,56
Jumlah	100,00	100,00	100,00

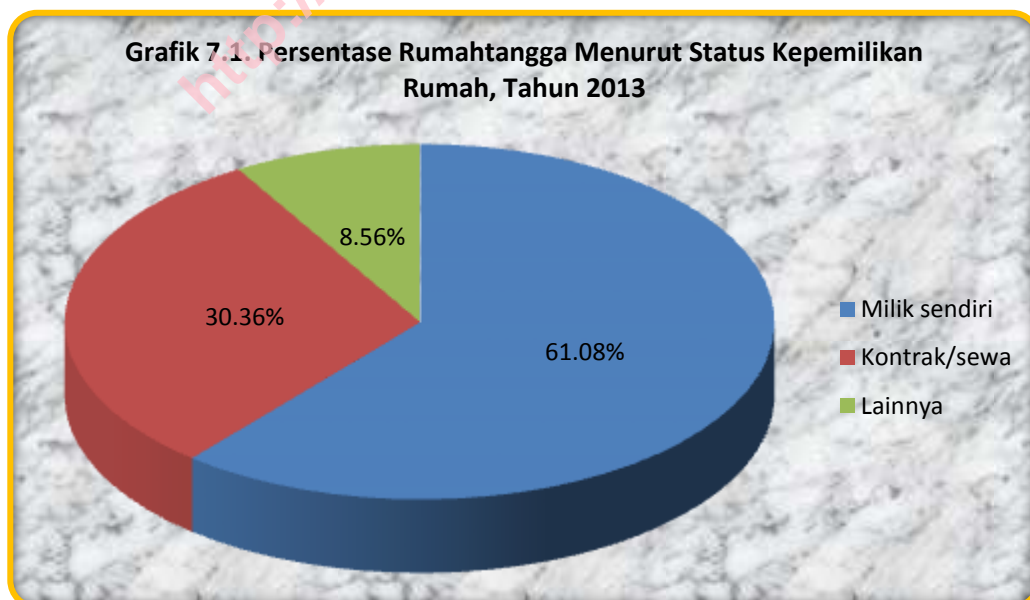
r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Pada tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah dengan status milik sendiri, yaitu sekitar 61,08 persen pada tahun 2013. Tentu saja hal ini merupakan hal yang positif karena status kepemilikan rumah dapat mengindikasikan tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak selalu mutlak. Meskipun terlihat agak berfluktuasi, namun persentase tersebut tidak berbeda jauh dengan dengan dua tahun sebelumnya. Sejalan dengan perkembangan persentase rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri, rumah yang menempati rumah dengan status menyewa atau mengontrak mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir, yaitu sekitar 26,88 persen

pada tahun 2011, sedikit menurun menjadi 25,94 persen pada tahun 2012, dan kembali meningkat menjadi 30,36 persen pada tahun 2013. Dengan demikian, jumlah rumah tangga yang mengontrak atau menyewa dapat dikatakan cukup tinggi. Hal tersebut sebagai dampak dari tingginya migrasi masuk ke Kota Bontang, sehingga memicu berkembangnya usaha persewaan rumah.

Sementara itu, rumah tangga yang menempati rumah dengan status lainnya (bebas sewa atau rumah dinas) terlihat tidak terlalu banyak berubah dalam tiga tahun terakhir. Sekitar 10,73 persen rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah berstatus lainnya pada tahun 2011, kemudian sedikit meningkat menjadi 11,46 persen pada tahun 2012, dan kembali sedikit menurun menjadi sekitar 8,56 persen pada tahun 2013. Perbandingan persentase rumah tangga yang menempati rumah berdasarkan status kepemilikan diperlihatkan dengan lebih jelas oleh Grafik 7.1. di bawah ini.



Indikator-indikator selanjutnya yang dapat digunakan dalam menilai kelayakan rumah yang ditempati oleh rumah tangga adalah luas lantai, jenis atap, dan jenis dinding yang digunakan. Jenis atap, dinding, dan lantai sebuah rumah mempengaruhi kenyamanan penghuninya, bahkan lebih jauh dapat mempengaruhi tingkat kesehatan. Tabel 7.2. berikut ini menyajikan beberapa indikator yang menggambarkan kondisi rumah yang ditempati oleh rumah tangga Kota Bontang secara rata-rata.

Tabel 7.2. Kondisi Perumahan di Kota Bontang, Tahun 2011—2013

Indikator	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Rata-rata luas lantai yang dikuasai rumah tangga (M ²)	76	73	81
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah beratap seng, asbes, dan genteng	91,23	96,33	96,82
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding tembok	67,35	64,27	74,44
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berdinding kayu	31,93	34,69	25,38
Persentase rumah tangga yang menghuni rumah berlantai bukan tanah	99,47	99,16	99,12

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Apabila dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Kalimantan Timur, Kota Bontang merupakan kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang masih relatif rendah. Sehingga ketersediaan lahan untuk pemukiman masih cukup tinggi. Hal ini salah satunya ditunjukkan oleh angka rata-rata luas lantai tempat tinggal yang mencapai 81 m² pada tahun 2013. Apabila secara rata-rata dianggap setiap rumah tangga terdiri atas empat orang,

maka rata-rata setiap anggota keluarga menempati luas lantai sekitar 20 m² atau dapat dikatakan layak.

Berdasarkan jenisnya, terdapat beberapa macam bahan yang biasa digunakan sebagai atap, yaitu genteng, sirap, seng, asbes, dan ijuk/rumbia. Sekitar 91,23 persen rumah tangga menggunakan atap berjenis seng, asbes, dan genteng pada tahun 2011. Persentase tersebut meningkat menjadi 96,82 persen di tahun 2013. Berdasarkan hal itu, terlihat bahwa jumlah rumah tangga yang menggunakan jenis atap yang berkualitas makin meningkat.

Selanjutnya apabila dilihat berdasarkan jenis dinding terluas yang digunakan, Tabel 7.2. di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2013 sekitar 74,44 persen rumah tangga di Kota Bontang menempati rumah berdinding tembok. Jumlah ini meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 64,27 persen. Seiring dengan peningkatan tersebut, jumlah rumah tangga yang menempati rumah berdinding kayu mengalami penurunan dari sekitar 34,69 persen di tahun 2012 menjadi 25,38 persen pada tahun 2013. Selain berkaitan dengan kenyamanan, jenis dinding terluas yang digunakan juga berkaitan dengan keamanan penghuninya, terutama terhadap kemungkinan terjadinya musibah kebakaran. Namun demikian, dinding kayu tidak selalu bisa diasosiasikan dengan tingkat kesejahteraan yang rendah, karena jenis kayu yang digunakan sangat beragam secara kualitas dan harga. Kelangkaan pasokan kayu mengakibatkan rumah berdinding jenis kayu tertentu justru mengindikasikan tingkat kesejahteraan pemiliknya yang tinggi.

Indikator selanjutnya yang dapat menggambarkan kelayakan sebuah rumah adalah jenis lantai yang digunakan. Rumah dikatakan layak huni apabila berlantai selain tanah, baik berupa marmer, tegel, semen, atau

kayu. Lantai tanah dapat mempengaruhi kualitas kesehatan penghuninya. Di Kota Bontang persentase rumah tangga yang menempati rumah berlantai bukan tanah sudah sangat tinggi, yaitu mencapai angka 99,12 persen pada tahun 2013. Angka tersebut menunjukkan bahwa meskipun kecil, namun masih ada rumah tangga di Kota Bontang yang menghuni rumah berlantai tanah.

7.2. Fasilitas Rumah

Rumah yang layak huni selain diindikasikan oleh bentuk dan kondisi bangunan fisik juga dipengaruhi oleh ketersediaan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti sumber penerangan, sumber air minum, dan fasilitas MCK (mandi cuci kakus) yang memadai. Tabel 7.3. di bawah ini memberikan gambaran rumah tangga Kota Bontang berdasarkan ketersediaan fasilitas rumah yang ditempati.

Tabel 7.3. Persentase Rumah Tangga Menurut Fasilitas Perumahan/Bangunan di Kota Bontang, Tahun 2011–2013

Fasilitas Perumahan / Bangunan	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Rumah tangga pengguna listrik	99,28	99,60	99,69
Rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri	71,47	79,81	70,76
Rumah tangga yang menggunakan tangki septik	93,27	87,74	94,99

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Ketersediaan sumber penerangan yang memadai merupakan faktor pendukung kelancaran aktivitas penduduk. Pada Tabel 7.3. di atas, terlihat

bahwa mayoritas rumah tangga di Kota Bontang telah menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Sekitar 99,69 persen rumah tangga menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, sedangkan sisanya menggunakan sumber lain seperti petromak atau pelita. Besarnya jumlah rumah tangga yang telah teraliri listrik tentu saja harus diikuti oleh pasokan listrik yang mencukupi. Listrik di Kota Bontang sebagian besar dipasok oleh PLN dan sebagian dibangkitkan oleh perusahaan yang beroperasi di Kota Bontang seperti PT. Pupuk Kaltim dan PT. Badak, dan sebagian kecil dibangkitkan sendiri oleh rumah tangga menggunakan genset. Listrik yang dibangkitkan oleh perusahaan utamanya ditujukan untuk perumahan karyawannya. Pada tahun 2013, rumah tangga yang dialiri oleh listrik PLN adalah sekitar 89,86 persen, sedangkan yang dialiri listrik non PLN adalah sekitar 9,83 persen. Persentase rumah tangga berdasarkan sumber penerangan utama yang digunakan ditunjukkan oleh Tabel 7.4. berikut ini.

Tabel 7.4. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Penerangan di Kota Bontang, Tahun 2011—2013

Sumber Penerangan	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Listrik PLN	92,62	95,39	89,86
Listrik Non PLN	6,66	4,16	9,83
Petromak/aladin/lainnya	0,72	0,45	0,31
Total	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang cukup beragam, misalnya air minum dalam kemasan bermerk, air isi ulang, ledeng, sumur, dan mata air baik yang terlindung maupun tidak

terlindung. Tabel 7.5. berikut ini menunjukkan persentase rumah tangga berdasarkan sumber air minum utama yang dikonsumsi.

Tabel 7.5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum yang Digunakan, Tahun 2011—2013

Sumber Air Minum	2011 ^{r)}	2012 ^{r)}	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Air dalam kemasan bermerk	4,76	3,69	5,41
Ledeng meteran/air isi ulang	84,58	89,17	88,83
Ledeng eceran	3,86	4,13	2,24
Sumur bor/pompa	3,23	0,85	0,70
Sumur terlindung	1,65	1,03	2,57
Sumur tak terlindung	1,92	1,01	0,17
Lainnya	-	0,12	0,09
Total	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Tabel di atas menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga di Kota Bontang mengonsumsi air ledeng atau air isi ulang. Jumlahnya mencapai 88,83 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Hal tersebut memperlihatkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Kota Bontang untuk mengonsumsi air yang dialirkan oleh PDAM, baik dengan cara memasak sendiri maupun dengan cara membeli dari usaha air isi ulang cukup tinggi. Namun demikian, dengan cukup cepatnya perkembangan perumahan dan permukiman di Kota Bontang, terdapat sebagian rumah yang belum terlayani oleh PDAM, sehingga masih ada rumah tangga yang memanfaatkan air PDAM dengan cara membeli ke tetangga yang sudah berlangganan atau membeli dari mobil tangki. Hal itu terlihat pada Tabel

7.5. di atas, yaitu sekitar 2,24 persen rumah tangga menggunakan air eceran sebagai sumber air minum utama. Di samping itu, terdapat sekitar 5,41 persen rumah tangga yang menggunakan air dalam kemasan bermerk. Hal ini umumnya dilakukan oleh rumah tangga berpenghasilan di atas rata-rata mengingat harga air dalam kemasan bermerk yang jauh lebih tinggi dari pada air isi ulang. Sementara itu, pada beberapa wilayah di Kota Bontang, air tanah yang ada dianggap layak untuk dikonsumsi. Terdapat sekitar 3,44 persen rumah tangga memanfaatkan air tanah baik dengan cara membuat sumur bor/pompa maupun sumur biasa. Penggunaan air dari sumur biasa perlu memperhatikan setidaknya dua hal. Pertama, apakah kandungan airnya layak dikonsumsi atau tidak. Kedua, sumur hendaknya dilindungi dengan tembok pada bagian lingkaran sumur. Hal itu bertujuan agar air bekas mencuci atau mandi tidak meresap dan mencemari air sumur. Apabila dilihat persentase rumah tangga pengguna air sumur, ternyata masih ada sekitar 0,17 persen rumah tangga yang menggunakan air sumur yang tidak terlindungi. Hal tersebut bisa jadi karena kurangnya pengetahuan atau sebab lainnya seperti biaya dan lain-lain.

Beberapa jenis sumber air dapat digunakan sendiri oleh rumah tangga dan dapat pula digunakan secara bersama-sama dengan rumah tangga lain. Jumlah rumah tangga yang memiliki fasilitas air minum sendiri di Kota Bontang cukup tinggi, yaitu sekitar 70,76 persen pada tahun 2013. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terlihat sedikit berfluktuasi, namun tidak terlalu signifikan. Angka tersebut mengindikasikan bahwa sekitar 29,24 persen rumah tangga menggunakan fasilitas air minum secara bersama-sama atau bahkan tidak ada. Penggunaan fasilitas air minum secara umum atau bersama-sama dapat berpengaruh pada kebersihan air minum yang dikonsumsi. Persentase

rumah tangga berdasarkan penggunaan fasilitas air minum ditunjukkan oleh Tabel 7.6. berikut ini.

Tabel 7.6. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Air Minum di Kota Bontang, Tahun 2011—2013

Penggunaan Fasilitas Air Minum	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Sendiri	71,47	79,81	70,76
Bersama/umum	24,97	17,70	28,53
Tidak ada	3,56	2,49	0,71
Total	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Sementara itu, jumlah rumah tangga yang menggunakan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir tinja juga cukup tinggi, mencapai 94,99 persen pada tahun 2013 atau meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa masih ada rumah tangga yang tempat pembuangan akhir tinjanya ke kolam/sawah, sungai/danau/laut, lubang tanah, atau. pantai/tanah lapang/kebun. Hal ini diperkirakan terjadi pada rumah tangga di wilayah pesisir pantai yang belum memahami arti penting kebersihan untuk kesehatan individu dan masyarakat. Namun secara umum, kondisi perumahan di Kota Bontang sudah dapat dikatakan layak dan memenuhi standar kesehatan.

Apabila dilihat berdasarkan penggunaan fasilitas tempat buang air besar, sebagian besar rumah tangga telah menggunakan tempat buang air besar sendiri, yaitu sekitar 95,35 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Angka ini mengalami kenaikan apabila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya yang sekitar 88,68 persen. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat buang air besar secara umum/bersama-sama dengan rumah tangga lain adalah sekitar 4,07 persen, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah sekitar 8,63 persen. Selain itu, ternyata masih ada rumah tangga yang tidak/belum mempunyai fasilitas tempat buang air besar, yaitu sekitar 0,58 persen dari seluruh rumah tangga yang ada. Hal tersebut ditunjukkan oleh Tabel 7.7. di bawah ini.

Tabel 7.7. Persentase Rumah Tangga Menurut Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar, Tahun 2011—2013

Kepemilikan Fasilitas Buang Air Besar	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Sendiri	90,18	88,68	95,35
Bersama/umum	6,01	8,63	4,07
Tidak ada	0,82	2,69	0,58
Total	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Jenis kloset yang digunakan pada fasilitas tempat buang air besar sangat berpengaruh pada kesehatan para pemakainya. Jenis kloset yang cenderung tertutup seperti leher angsa adalah sangat baik apabila dilihat dari segi kesehatan maupun segi estetika. Sedangkan jenis kloset seperti cemplung/cubluk maupun plengsengan dapat menimbulkan masalah seperti bau yang mengganggu. Tabel 7.8. berikut ini menunjukkan persentase rumah tangga di Kota Bontang berdasarkan jenis kloset yang digunakan.

Tabel 7.8. Persentase Rumah Tangga Menurut Jenis Kloset yang Digunakan, Tahun 2011—2013

Jenis Kloset	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
Leher angsa	88,17	91,12	96,26
Plengsengan	7,19	3,56	2,36
Cemplung/cubluk	3,47	3,73	1,38
Tidak pakai	1,17	1,59	-
Total	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Jenis kloset yang paling banyak digunakan oleh rumah tangga di Kota Bontang adalah yang berbentuk leher angsa, yaitu kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf U (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar. Rumah tangga yang menggunakan kloset jenis ini adalah sekitar 96,26 persen, meningkat apabila dibandingkan pada tahun 2012 yang sekitar 91,12 persen dan tahun 2011 yang sekitar 88,17 persen. Sementara itu jumlah rumah tangga yang menggunakan kloset berjenis plengsengan adalah sekitar 2,36 persen. Kloset plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran. Sedangkan rumah tangga yang menggunakan kloset berjenis cemplung/cubluk adalah sekitar 1,38 persen. Pada tahun 2011 dan 2012, rumah tangga yang tidak menggunakan kloset berkisar antara 1,17 sampai 1,59 persen, pada tahun 2013 rumah tangga tersebut diperkirakan masih ada, namun persentasenya sangat sedikit/kecil.

BAB VIII. POLA KONSUMSI

Tingkat kesejahteraan rumah tangga secara nyata dapat diukur dari tingkat pendapatan yang dibandingkan dengan kebutuhan minimum untuk hidup layak. Perubahan tingkat kesejahteraan dilakukan dengan melihat pola pengeluaran rumah tangga berdasarkan pengeluaran. Pengeluaran rumah tangga dibedakan menjadi dua yaitu pengeluaran untuk makanan dan untuk bukan makanan. Di negara berkembang umumnya pengeluaran untuk makanan masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Perubahan angka persentase tersebut setiap tahunnya dapat menunjukkan perkembangan taraf kehidupan rumah tangga.

Melalui survei yang dilakukan oleh BPS Kota Bontang, diperoleh informasi mengenai keadaan sosial ekonomi atau tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang. Berikut disajikan beberapa indikator yang diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang pada tahun 2013.

8.1. Pengeluaran Rumah Tangga

Pengeluaran rumah tangga merupakan salah satu indikator yang dapat memberi gambaran tingkat kesejahteraan penduduk. Makin besar porsi pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan, makin baik tingkat kesejahteraan rumah tangga yang bersangkutan. Masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menggunakan sebagian besar pendapatannya untuk pengeluaran konsumsi makanan yang memang merupakan kebutuhan utama dan tidak dapat ditunda pemenuhannya. Sedangkan pada rumah tangga berpenghasilan tinggi, peningkatan pendapatan umumnya diiringi oleh meningkatnya pengeluaran, baik

karena makin beragamnya jenis barang/jasa yang ingin dikonsumsi maupun makin baiknya kualitas barang/jasa yang dikonsumsi. Tabel 8.1. di bawah ini menggambarkan perkembangan proporsi pengeluaran rumah tangga dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 8.1. Persentase Pengeluaran Penduduk Menurut Kelompok Makanan dan Bukan Makanan, Tahun 2008—2013

Jenis Pengeluaran	2008	2009	2010	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>	<i>(6)</i>	<i>(7)</i>
Makanan	42,86	45,71	45,82	38,76	36,50	39,02
Bukan makanan	57,14	54,29	54,18	61,24	63,50	60,98
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

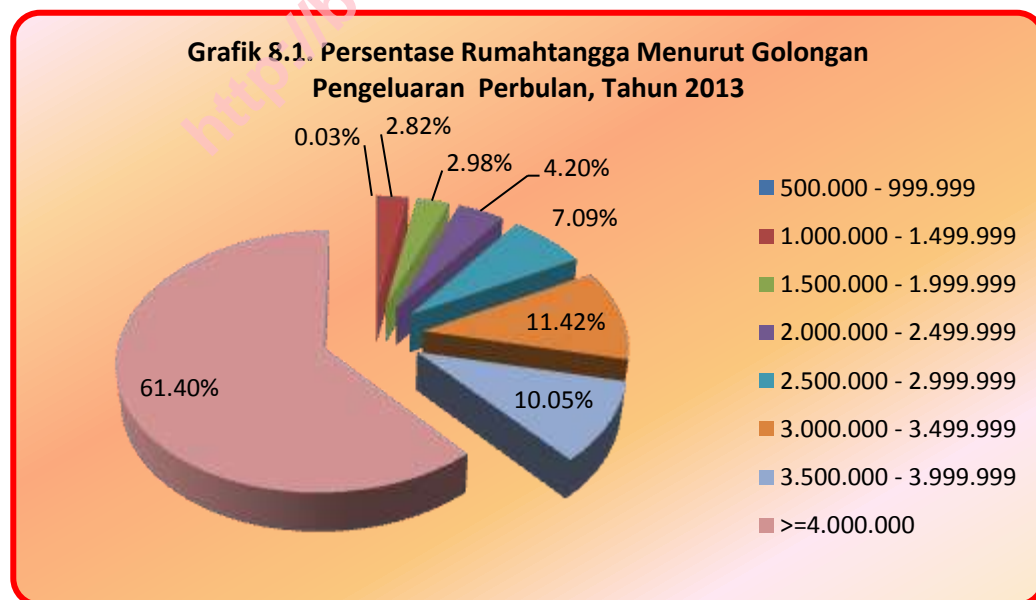
Secara umum, persentase pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan makanan mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2008 pengeluaran rumah tangga untuk makanan adalah sekitar 42,86 persen dari seluruh pengeluaran rumah tangga. Nilai tersebut terus menurun hingga menjadi sekitar 39,02 persen pada tahun 2013.

Penurunan persentase pengeluaran rumah tangga untuk makanan tentu saja sejalan dengan meningkatnya persentase pengeluaran rumah tangga untuk bukan makanan. Pada tahun 2008, pengeluaran untuk bukan makanan adalah sekitar 57,14 persen, meningkat menjadi 54,18 persen pada tahun 2010, dan terus meningkat menjadi sekitar 60,98 persen pada tahun 2013. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Bontang makin membaik dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, gambaran di atas merupakan kondisi secara makro. Sedangkan apabila dilihat secara mikro, diperkirakan masih

ada rumah tangga yang tingkat kesejahteraannya sangat rendah. Oleh sebab itu, indikator makro perlu ditindaklanjuti dengan observasi secara langsung agar diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil dapat disesuaikan dengan masing-masing kondisi masyarakat.

8.2. Komposisi Pengeluaran Rumah tangga

Selain berdasarkan proporsi pengeluaran rumah tangga untuk makanan dan untuk bukan makanan, tingkat kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat berdasarkan nilai pengeluarannya. Untuk memudahkan, rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan dikelompokkan menjadi beberapa kelompok pengeluaran. Grafik 8.1. di bawah ini memperlihatkan struktur rumah tangga di Kota Bontang menurut kelompok pengeluaran rumah tangga per bulan pada tahun 2013.



Grafik 8.1. memperlihatkan bahwa pada tahun 2013 rumah tangga di Kota Bontang didominasi oleh rumah tangga berpengeluaran rata-rata lebih dari empat juta per bulan. Apabila setiap rumah tangga diasumsikan

terdiri atas empat orang, maka penduduk Kota Bontang didominasi oleh penduduk berpengeluaran per kapita sebesar satu juta atau lebih per bulan. Hal ini mengindikasikan bahwa secara rata-rata tingkat kesejahteraan penduduk Kota Bontang cukup tinggi. Persentase rumah tangga menurut kelompok pengeluaran per bulan disajikan secara *series* pada Tabel 8.2. berikut ini.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga Menurut Golongan Pengeluaran Rata-rata Perbulan, Tahun 2011—2013

Golongan Rata-rata Pengeluaran Rumah Tangga Perbulan	2011^{r)}	2012^{r)}	2013
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
< Rp500.000	0	0	0
Rp500.000—Rp999.999	0,57	0,88	0,03
Rp1.000.000—Rp1.499.999	2,06	1,42	2,82
Rp1.500.000—Rp1.999.999	9,26	6,15	2,98
Rp2.000.000—Rp2.499.999	11,95	8,65	4,20
Rp2.500.000—Rp2.999.999	13,06	12,49	7,09
Rp3.000.000—Rp3.499.999	10,11	7,10	11,42
Rp3.500.000—Rp3.999.999	10,70	7,58	10,05
≥ Rp4.000.000	42,29	55,71	61,40
Total	100,00	100,00	100,00

r) = Angka revisi

Sumber: Susenas (Badan Pusat Statistik Kota Bontang)

Rumah tangga dengan rata-rata pengeluaran per bulan sebesar empat juta atau lebih terlihat cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir, yaitu sebesar 42,29 persen pada tahun 2011 meningkat menjadi sekitar

55,71 persen pada tahun 2012 dan terus meningkat menjadi sebesar 61,40 persen pada tahun 2013. Peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga per bulan bisa disebabkan oleh faktor inflasi (kenaikan harga barang dan jasa)s. Namun jika inflasi tidak diiringi oleh peningkatan daya beli, maka masyarakat tetap tidak akan bisa meningkatkan pengeluarannya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sebaliknya, apabila kenaikan daya beli tidak sebanding dengan kenaikan harga barang/jasa, maka inflasi akan diatasi dengan mensubsitisi barang/jasa kebutuhan yang biasa dikonsumsi dengan barang/jasa sejenis yang lebih terjangkau atau dengan kualitas yang berbeda.

Peningkatan persentase rumah tangga berpendapatan tinggi (kaya) diiringi oleh penurunan persentase rumah tangga berpendapatan menengah. Hal ini terlihat pada cenderung menurunnya persentase rumah tangga yang mempunyai rata-rata pengeluaran antara 1,5 juta sampai 3 juta perbulan. Sementara itu pada penduduk dengan pendapatan rendah tidak terlihat ada perubahan yang signifikan namun cenderung memiliki pola menurun. Dengan demikian terlihat bahwa secara makro (rata-rata), keadaan perekonomian masyarakat Kota Bontang sudah cukup tinggi. Namun demikian, hal lain yang penting pula untuk diperhatikan adalah kesenjangan antar rumah tangga yang dapat berimplikasi pada kecemburuan sosial.

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<http://bontangkota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

Jl. Awang Long No.2
Kelurahan Bontang Utara

Telp./Faks. 0548.26066/054827706

Email: bps6474@bps.go.id, Website: bontangkota.bps.go.id